

**PARTISIPASI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BATIK DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH PRODUKSI DI KECAMATAN LAWEYAN
SURAKARTA**



SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

SURAKARTA

commit to user
2013

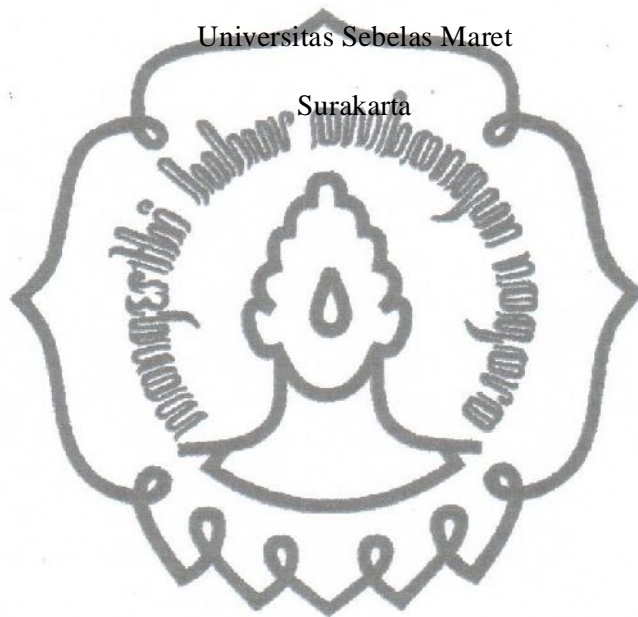
HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Drs. H. Sakur M.S.
NIP. 194902051980121001

commit to user

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Sonhaji, M.Si (.....)
NIP. 195912061988031004 Ketua
2. Drs. Suryatmojo, M.Si (.....)
NIP. 195308121986011001 Sekretaris
3. Dra. H. Sakur, M.S (.....)
NIP. 194902051980121001 Penguji

Mengetahui,

Dekan

Prof. Pawito, Ph.D

NIP. 195408051985031002

MOTTO

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri...”

(QS. Ar-Ra'd :11)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

”Kemampuan tak terbatas hanya dapat dimiliki dengan semangat pantang menyerah.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kasih sayang, doa, nasihat dan dukungan yang tak pernah berhenti sampai kapanpun.
- Mas Hafid, Mbak Fitri, dan Rizky, telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan.
- Raras Putri, terima kasih atas segala perhatian dan pengertiannya selama ini.
- Teman-teman dan sahabat-sahabatku lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
- Almamaterku UNS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga selesailah penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini.

Adapun skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, pantas kiranya penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Sakur M.S. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Drs. D. Priyo Sudibyo M. Si selaku pembimbing akademis yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
3. Prof. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
4. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

6. Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sultan Nadjamuddin, Bapak Arif Budiman, Bapak Bambang Slameto, Bapak Arif Wicaksono, Bapak Rudi, Bapak Angga, Ibu Yuanita, dan Ibu Debby Indah selaku informan yang telah banyak memberikan banyak informasi sebagai materi analisis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak, Ibu, Adik, Kakak dan segenap keluarga besar, terima kasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayangnya.
9. Teman-teman seperjuangan AN '09 (Erwin, Arfi, Windy, Ajeng, Rista, Dinda, Nungki, Cicun, Hilda, Rizka, Titis, Mita, Bimo, Hero, Galuh, Hanum, Bambang, dan lainnya), kerabat Closed, dan Raras Putri yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga jadi amal kelak di akherat Amin.

Penulis juga sadar bahwa skripsi ini juga masih jauh dari sempurna, maka dengan senang hati akan menerima kritik dan saran atas perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, Januari 2013

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Partisipasi.....	16
B. Cara Menggerakkan Partisipasi.....	19
C. Indikator Partisipasi.....	20
D. Jenis Partisipasi.....	21
E. Tipe Partisipasi.....	22
F. Cara Pandang Partisipasi Efektif.....	28
G. Hambatan-Hambatan Partisipasi.....	30
H. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Isu Lingkungan.....	32
I. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM).....	35
J. Pengertian Batik.....	37
K. Kerangka Berfikir.....	38

commit to user

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Bentuk Penelitian.....	40
C. Teknik Sampling.....	41
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Validitas Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
1. Kecamatan Laweyan.....	49
2. Tinjauan Umum Kampung Batik Laweyan.....	50
a. Sejarah.....	50
b. Sosial Budaya.....	52
c. Produksi Batik Laweyan.....	53
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	55
1. Cara Keterlibatan.....	55
2. Intensitas dan Frekuensi Kegiatan.....	86
3. Hambatan Pengelolaan Limbah UKM Batik Laweyan.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
---------------------	-----

LAMPIRAN.....	114
---------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Pencemaran di Sungai Jenes (Kawasan Laweyan).....	4
Tabel I.2 Kriteria Mutu Air.....	5
Tabel II.1 Jenis Partisipasi.....	21



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Perbedaan Pandangan Partisipasi Yang Efektif	30
Gambar II.2 : Kerangka Berfikir.....	38
Gambar III.1 : Model Analisis Interaktif H.B. Sutopo	48
Gambar IV.1 : Proses Pembuatan Batik.....	54



ABSTRAK

Muhammad Furqon Wahyu Wibowo. D0109061.PARTISIPASI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BATIK DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI DI KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 2013. 112 Halaman

Pengelolaan Limbah cair UKM batik di Surakarta yang belum optimal telah membuat beberapa sungai yang bermuara di Bengawan Solo tercemar. Kandungan logam berat yang terkandung dalam limbah cair dapat merusak jaringan tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu setiap UKM Batik dituntut berpartisipasi melakukan pengelolaan limbah berdasarkan UU no 32 tahun 2009, serta AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sebagai wujud tanggung jawab sosial, agar limbah yang dibuang tidak lagi membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi UKM batik di kecamatan Laweyan Surakarta dalam mengelola limbah industrinya berdasarkan cara keterlibatan, serta intensitas dan frekuensi kegiatan pengelolaan limbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi di kecamatan Laweyan Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari beberapa informan yaitu UKM batik Laweyan, kepala BLH Surakarta, ketua FPKBL, dan masyarakat sekitar UKM batik Laweyan, lalu data dari sumber tertulis yang berhubungan dengan partisipasi UKM batik Laweyan dalam mengelola limbah. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan telaah dokumen. Sedangkan untuk validitas data dilakukan dengan triangulasi data atau sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan partisipasi UKM batik Laweyan dalam pengelolaan limbah produksinya, dengan melihat dari 2 tipe partisipasi, yaitu cara keterlibatan, serta intensitas dan frekuensi kegiatan. Cara keterlibatan UKM batik dalam mengelola limbah merupakan cara keterlibatan secara langsung, diwujudkan dalam 4 kegiatan, yaitu dimulai dari memiliki surat izin usaha atau rekomendasi lingkungan, menghadiri rapat dengan BLH dan antar UKM batik yang berhubungan tentang pengelolaan limbah, dan yang terakhir mengelola limbah produksinya. Dari 4 kegiatan pengelolaan limbah tersebut, ternyata partisipasi UKM batik Laweyan masih beragam, ada UKM yang melakukan semua kegiatan pengelolaan limbah tersebut, namun kecenderungan UKM batik Laweyan masih tidak melakukan kegiatan pengelolaan limbah. Sedangkan intensitas dan frekuensi kegiatan yang dilihat adalah kehadiran UKM Batik Laweyan dalam rapat dengan BLH dan antar UKM yang membahas pengelolaan limbah, partisipasi UKM batik dalam hal ini termasuk pada partisipasi ekstensif, karena kegiatan rapat baik dengan BLH maupun antar UKM dilakukan secara tidak teratur, dan dalam interval yang panjang. Selanjutnya dapat terlihat hambatan dalam pengelolaan limbah yang muncul dari sudut pandang UKM batik, BLH Surakarta, dan FPKBL.

ABSTRACT

Muhammad Furqon Wahyu Wibowo. D0109061. THE PARTICIPATION OF BATIK SMALL-TO-MIDDLE SCALE ENTERPRISE (SMSE) IN MANAGING THE INDUSTRIAL WASTE IN LAWEYAN SUBDISTRICT OF SURAKARTA. Thesis. Administration Science Department of Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University. 2013. 112 pages

The less optimally liquid waste management of the batik Small-to-Middle Scale Enterprise (SMSE) in Surakarta contaminated several rivers ending up in Bengawan Solo. The heavy metal level contained in the liquid waste can damage the living organism body's tissue. For that reason, every Batik SMSE is required to participate in managing the waste based on the Act No. 32 of 2009, and than AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan), as the manifestation of social responsibility, to make the disposed waste not harmful to environment and society.

This research aims to know the participation of batik SMSE in Laweyan subdistrict of Surakarta in managing its industrial waste by involvement way, intensity and frequency of waste management activity. The method used in this research was a descriptive qualitative method taken place in Laweyan subdistrict of Surakarta. The data source of research derived from such informant as Batik SMSE of Laweyan, chairman of BLH Surakarta, chairman of FPKBL, and society surrounding the Laweyan Batik SMSE, and the data from written source relevant to the participation of Laweyan Batik SMSE in managing the waste. The technique of selecting informant used was purposive sampling. Technique of collecting data used was in depth interview and document study. Meanwhile, the data validation was conducted using data or source triangulation. Technique of analyzing data used was an interactive analysis model.

The result of analysis described the participation of Laweyan Batik SMSE in managing its industrial waste, by considering two types of participation: involvement, and activity intensity and frequency. The way in which batik SMSE participated in managing the waste was the direct one, manifested in 4 activities starting from business license or environment recommendation, attending the meeting with BLH and between batik SMSEs regarding the waste management, and finally managing its industrial waste. Out of the four activities relating to the waste management, the batik SMSEs' involvement was in fact still varied, some SMSE performed all waste management activities, but some other did not performed it. Meanwhile, the activity intensity and frequency viewed was the presence of Laweyan Batik SMSE in the meeting with BLH and that between SMSEs discussing the waste management; the participation of batik SMSE, in this case, was included into extensive participation, because the meeting activities, both with BLH and between SMSE were conducted irregularly, with no schedule, and in long interval. Furthermore, it could be seen the obstacles occurring in waste management from batik SMSE's, Surakarta BLH's and FPKBL's perspectives.

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki berbagai macam Industri di dalamnya. Dari berbagai Industri yang terdapat di Surakarta, industri batik merupakan industri yang banyak di geluti oleh masyarakat kota Surakarta. Hingga saat ini jumlah pengusaha batik di Surakarta sudah mencapai 200 lebih industri/pengusaha yang di dominasi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM). (<http://www.facebook.com/notes/kampoeng-batik-laweyan-solo>, 2012).

Banyaknya industri batik ini memberikan berbagai dampak positif dalam bidang ekonomi, social, budaya dan pariwisata. Dari bidang ekonomi jelas terlihat dengan adanya industri batik ini tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lowongan pekerjaan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan bertambah. Industri batik ini juga memmbuat nama kota Solo sebagai salah satu kota yang masih kental dengan budaya local semakin bertambah, dengan batik sebagai identitas kota Solo, selain itu juga akan dapat menarik minat wisatawan domestic maupun mancanegara untuk berkunjung ke kota Solo.

Dampak positif industri batik ini juga diikuti oleh dampak negatif yang masih belum dapat diatasi hingga saat ini, yaitu belum terkelolanya limbah produksi batik dan hal tersebut tentu saja cenderung merugikan masyarakat. Semakin banyaknya

jumlah produsen/pengusaha batik di Solo, berarti akan selalu diikuti dengan banyaknya jumlah limbah sebagai hasil dari sisa proses produksi batik tersebut.

Limbah industri batik terdiri dari 2 jenis, limbah padat dan limbah cair, limbah padat berupa sisa kain batik, limbah kain ini bisa dikelola dengan baik sehingga menjadi barang bernilai ekonomis, seperti tas, dompet, dan keset. Berbeda halnya dengan limbah cair yang sampai sekarang masih belum dapat dikelola dengan baik oleh UKM. Limbah cair yang dihasilkan oleh produksi batik tersebut pada dasarnya sangat berbahaya bagi lingkungan dan bagi kesehatan masyarakat sekitarnya, maka dari itu sangat diperlukan pengelolaan dengan baik agar limbah cair itu tidak berbahaya.

Limbah cair batik mengandung logam Kadmium yang digunakan sebagai bahan pewarna pada industri plastik dan konveksi/batik, cemaran logam berat berupa Kadmium tergolong mineral mikroelemen dan merupakan logam berat. Kandungan logam berat itu biasa disebut jenis Bahan Beracun Berbaha (B3), pada pencemaran air oleh limbah industri di Sungai Bengawan Solo terdapat kandungan logam berat yang tinggi dan melebihi ambang batas. Dikhawatirkan juga ini terdapat dan terakumulasi dalam sedimen disungai Bengawan Solo. Logam berat yang terkandung dalam sedimen sungai seperti timbal dan kadmiun memiliki toksisitas yang dapat ditemukan dan menetap di dalam alam, tetapi bentuk kimianya dapat berubah akibat pengaruh fisikokimia, biologis maupun aktivitas manusia dan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Jika didapatkan konsentrasi yang tinggi di dalam lingkungan, logam-

logam ini dapat merusak jaringan tubuh makhluk hidup. (<http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/07/04>)

Seperti yang telah dilansir oleh media cetak local kota Solo, yaitu Solopos pada tanggal 5 Juli 2011, yang menyebutkan bahwa limbah batik lah yang menyebabkan pencemaran utama di kali Jenes, kali atau sungai yang berada dikawasan kampung batik laweyan. Dimana air yang mengalir di sungai Jenes kini berwarna pekat dan berbau tidak sedap. Selain itu, sungai yang airnya tampak berwarna cokelat kehitaman dan bermuara ke Bengawan Solo adalah sungai Premulung (dikenal juga sebagai sungai Wingko). Limbah itu berasal dari industri rumah tangga pengecatan batik di Laweyan, Surakarta. Selain mencemari sungai, limbah itu juga mencemari udara karena menebarkan bau tak sedap. Lalu sungai Pepe yang bermuara lebih ke hilir Bengawa Solo, tepatnya di Kampung Sewu, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jabres, Surakarta, mengalirkan air berwarna ungu. Pemandangan serupa terlihat di beberapa sungai setelahnya yang bermuara ke Bengawan Solo.

Data sungai di kawasan kecamatan Laweyan yang tercemar akibat proses produksi dari pembuatan batik kecamatan Laweyan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 Data Pencemaran di Sungai Jenes (Kawasan Laweyan) 2011

Tahun	Lokasi Pengambilan Sampel	Parameter Fisika		Parameter Kimia										
		Temp	TSS	pH	Cr	Br	Cu	Fe	Sulf	Klor	Klor	Nit	Nitrit	NH ₃
		(°C)	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
2009	S.Jenes hulu	29.5	36	7.44	0.070	0.10	0.05	0.10	21	0.02	0.54	0.9	0.052	0.07
	S.Jenes tengah	32.3	23	8.51	0.072	0.18	0.03	0.03	20	0.01	0.37	1.4	0.089	0.05
	S.Jenes hilir	31.7	29	7.50	0.057	0.18	0.01	0.01	19	0.02	0.68	0.4	0.92	0.03
2010	Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan penelitian													
2011(Musim Kemarau)	S.Jenes hulu	26.9	13	7.2	0.039	0.24	0.16	0.35	22.0	0.10	0.10	8.9	0.042	0.05
	S.Jenes tengah	26.9	23	7.3	0.050	0.25	0.13	0.32	26.0	0.16	0.21	9.8	0.078	0.03
	S.Jenes hilir	27.7	102	7.7	0.082	0.46	0.32	0.42	64.0	0.20	0.93	29.0	0.019	0.02
2011(Musim Penghujan)	S.Jenes hulu	28.0	19	7.6	0.014	0.14	0.20	1.2	0.46	0.15	0.24	8.1	0.61	0.02
	S.Jenes tengah	28.2	25	7.5	0.016	0.12	0.23	1.5	0.58	0.17	0.27	9.5	0.11	0.01
	S.Jenes hilir	28.4	27	7.6	0.09	0.12	0.13	1.1	0.25	0.19	0.28	8.4	0.85	0.01

Sumber : Pengolahan Data Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Di lihat dari tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat pencemaran limbah cair di Sungai Jenes (yang merupakan sungai di kawasan Kampung Batik Laweyan) menurun namun ada beberapa kandungan senyawa kimia yang meningkat dan melebihi kriteria mutu air. Menurut PP no 82 tahun 2001, kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.

Tabel I.2 Kriteria Mutu Air

Parameter	Satuan	Kelas			
		I	II	III	IV
pH		6-9	6-9	6-9	5-9
Besi (Fe)	mg/l	0,3	(-)	(-)	(-)
Mangan (Mn)	mg/l	0,1	(-)	(-)	(-)
Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	0,02	0,02	0,2
Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01
Seng (Zn)	mg/l	0,05	0,05	0,05	2
Timbal (Pb)	mg/l	0,03	0,03	0,03	1
Kromium (Cr)	mg/l	0,05	0,05	0,05	1
Arsen (As)	mg/l	0,05	1	1	1
Air raksa (Hg)	mg/l	0,001	0,002	0,002	0,005

Keterangan: Kelas I = bahan baku air minum
 Kelas II = sarana rekreasi air, budi daya ikan air tawar, peternakan
 Kelas III = budidaya ikan tawar, peternakan
 Kelas IV = pengairan

Bisa dibandingkan dari data pencemaran yang terjadi di Sungai Jenes dan batas kriteria air yang ditetapkan oleh PP no 82 tahun 2001 pada tabel I.2, masih ada kandungan senyawa kimia berbahaya dan melebihi ambang batas, seperti pada tahun 2009 di daerah Sungai Jenes hilir kandungan Krom (Cr) menunjukkan angka 0.057 mg/L sedangkan pada tahun 2011 (musim kemarau) meningkat menjadi 0.082 mg/L,

dan telah termasuk criteria air yang hanya layak untuk pengairan, karena belum melebihi ambang batas Krom (Cr) bagi kelas IV yang maksimal sebesar 1 mg/L. Kandungan Brome (Br) dari tahun 2009 ke tahun 2011 juga terjadi peningkatan seperti di Sungai Jenes hulu pada tahun 2009 besarnya kandungan hanya 0.10 mg/L sedangkan pada tahun 2011 (musim kemarau) meningkat menjadi 0.24 mg/L, Sungai Jenes Tengah 0.18 mg/L (2009) menjadi 0.25 mg/L (2011), Sungai Jenes Hilir 0.18 mg/L menjadi 0.46 mg/L, dalam kriteria air, Brome (Br) ini tidak boleh terkandung dalam 4 kriteria air, yang berarti bahwa air sungai Jenes berbahaya dan tidak bisa digunakan oleh makhluk hidup. Kandungan Besi (Fe) dari tahun 2009 ke tahun 2011 juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan di ketiga sungai tersebut, pada Sungai Jenes Hulu (2009) Kandungan Besi (Fe) menunjukkan angka 0.10 mg/L sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 0.35 mg/L, Sungai Jenes Tengah (2009) terjadi peningkatan yang signifikan pula pada tahun 2011 yaitu dari 0.03 mg/L menjadi 0.32 mg/L, Sungai Jenes Hilir juga terjadi peningkatan yang cukup besar dimana pada tahun 2009 menunjukkan angka pada 0.1 mg/L sedangkan pada tahun 2011 menunjukkan angka 0.42 mg/L, bahkan pada musim penghujan di tahun 2011 melonjak lagi menjadi 1.1 mg/L, kandungan Besi (Fe) pada tahun 2011 telah melewati ambang batas kriteria air yang seharusnya maksimal kandungan Besi (Fe) 0.3, dan berarti air sungai Jenes tidak bisa dimanfaatkan untuk makhluk hidup. Hal ini membuktikan bahwa masih adanya permasalahan peningkatan kadar pencemaran oleh karena itu perlu adanya tindakan bersama untuk mengatasi permasalahan pencemaran yang terjadi di Sungai pada kawasan kecamatan Laweyan.

Pencemaran-pencemaran tersebut terjadi karena pengelolaan limbah industri yang kurang optimal dari pengusaha/produsen. Lingkungan dan masyarakat sekitar usaha batik akan mendapatkan masalah serius apabila pengelolaan limbah yang belum optimal ini terus dibiarkan.

Ternyata masalah pengelolaan limbah yang tidak optimal ini juga merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh Negara di bumi ini. Hampir semua Negara kesulitan untuk mengelola limbah yang ada pada wilayahnya, dan merasakan berbagai dampak negatif dari adanya limbah tersebut. Oleh sebab itu dunia membuat suatu konsesnsus tujuan bersama agar masalah-masalah yang dihadapi pada lingkup global dapat diatasi lewat adanya tujuan bersama ini, consensus tujuan atau sasaran global bersama ini disebut dengan Millenium Development Goals (MDG's).

MDG's yang merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara PBB tentang tujuan bersama/tujuan global yang ingin dicapai oleh setiap Negara, khususnya Negara yang ikut menandatangani konsesnsus tersebut. Ada 8 tujuan MDGs yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2015. (<http://id.wikipedia.org>, 2012). Dari 8 tujuan tersebut masalah tentang limbah juga menjadi sorotan yang sangat erat kaitanya dengan salah satu poin pada MDG's, yaitu sustainabilitas lingkungan/memastikan kelestarian lingkungan hidup, dimana limbah dan lingkungan merupakan 2 hal yang saling berhubungan. Limbah yang tidak dapat dikelola dengan baik tentu saja akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan,

selanjutnya mengakibatkan sustainabilitas lingkungan tidak dapat tercapai. Namun apabila limbah bisa dikelola dengan baik, limbah akan dapat memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan.

Di Indonesia sendiri, berbagai kebijakan dibuat terkait dengan kelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah, diantaranya adalah adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dalam peraturan pemerintah no. 27 tahun 1999, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (<http://prokum.esdm.go.id>). Selain itu ada pula UU no 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU tersebut juga diatur tentang pengelolaan limbah industri atau usaha. (<http://www.komisiinformasi.go.id>, 2012)

Dari berbagai consensus dan regulasi baik tingkat internasional maupun nasional terkait dengan limbah tersebut, berarti menandakan bahwa limbah merupakan permasalahan yang urgen dan butuh penyelesaian yang tepat. Untuk mensukseskan regulasi-regulasi tersebut, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sebagai actor tunggal, melainkan dituntut adanya partisipasi aktif para pelaku usaha dalam mengelola limbah industrinya sendiri, agar limbah tidak berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat, atau bahkan dapat bermanfaat.

Sebenarnya pemerintah kota Surakarta telah menindaklanjuti adanya pencemaran yang terjadi pada lingkungan akibat kurang optimalnya pengelolaan limbah industri batik. Kantor Lingkungan Hidup bekerjasama dengan GTZ (*Deutsche Gesselscharft Fur Technische Zusammenarbeit*) ProLH, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Bappedal Propinsi Jawa Tengah berupaya untuk membantu pengusaha UKM Batik di Kota Surakarta, khususnya di Laweyan dalam mengolah dan menurunkan pencemaran airnya, melalui kegiatan “Penerapan Produksi Bersih/Ekoeffisiensi Dalam Pengendalian Pencemaran Air”, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengolahan limbah cair industri rumah tangga batik melalui pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal. (<http://www.facebook.com/notes/kampoeng-batik-laweyan-solo>, 2012)

Teknologi IPAL merupakan pengembangan dari Teknologi yang didesain untuk pengolahan limbah batik dan printing kalangan UKM seperti di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta. Program ini dapat berjalan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup, dimana program IPAL ini di atur dalam Perda tersebut. (<http://www.surakarta.go.id/sites/BadanLingkunganHidup>, 2012). Teknologi IPAL adalah sebuah sistem, merupakan interaksi dan interdependensi diantara subsistem mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan kedudukan komponen-komponen secara individual. Sebuah sistem sebagai suatu seri interelasi dan interdependensi bagian-bagian sehingga interaksi atau saling pengaruh mempengaruhi setiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan. (Lihat lampiran gambar 4)

Konsep Teknologi IPAL memanfaatkan energi gravitasi secara bejana berhubungan dengan proses biologis, yang tidak perlu input energi listrik dan bahan kimia. Penggunaan Teknologi IPAL diperoleh keuntungan, disamping mudah operasional dan perawatan, juga murah (*low maintenance*). Pada tahun 2008 tercatat sudah 15 pengusaha batik yang berpartisipasi dalam pemasangan IPAL untuk mengelola air limbahnya, hal ini menunjukkan bahwa adanya keikutsertaan dari beberapa pengusaha/UKM batik dalam pemasangan IPAL untuk mengelola air limbah produksinya, walaupun belum semua UKM menggunakan IPAL, namun setidaknya pencemaran mulai dapat dikurangi. (<http://batikita.multiply.com>, 2012)

Tujuan utama dari pengolahan air limbah disini ialah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Dari banyaknya pencemaran lingkungan terutama pencemaran air sungai akibat dari limbah cair hasil industri batik yang ada di Surakarta tersebut, tentu saja penanganan atau jalan keluar dari permasalahan ini tidak cukup di pecahkan atau di selesaikan oleh pemerintah saja, melainkan dibutuhkan partisipasi aktif dari pengusaha atau UKM batik itu sendiri, dan bantuan/kontribusi dari pihak swasta/non pemerintah, sebaik apapun kebijakan atau regulasi dari pemerintah untuk mengelola limbah, tanpa diikuti oleh kontribusi dan partisipasi aktif dari UKM batik itu sendiri, tentunya kebijakan tersebut tidak akan bisa menjadi solusi permasalahan ini.

Sebagai seorang pengusaha tentu saja para UKM batik ini juga harus memperhatikan tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Definisi tanggung jawab social atau CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan/pengusaha yang mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan dari stakeholder-nya. (http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr, 2012)

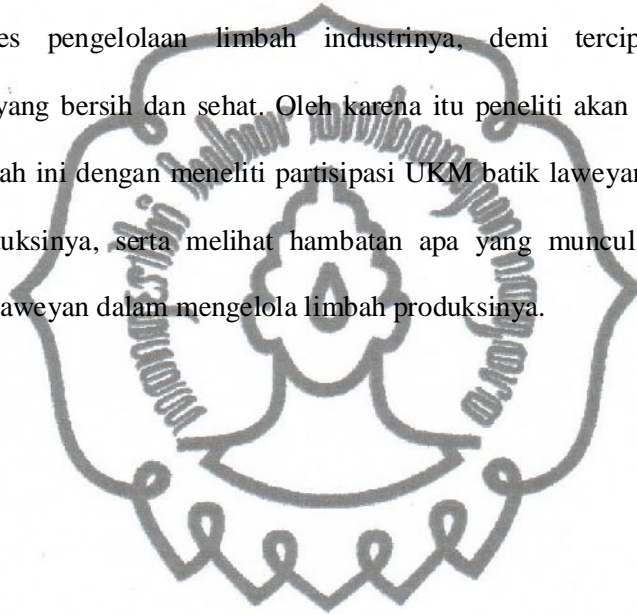
Jika ditarik pada pengertian di atas maka CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah bahwa perusahaan/pengusaha mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak

lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. (<http://www.djpp.depkumham.go.id>, 2012)

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan limbah ini, telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu oleh Alia Damayanti, Joni Hermana, dan Ali Masduqi, yang berjudul *Analisis Resiko Lingkungan Dari Pengolahan Limbah Pabrik Tahu Dengan Kayu Apu*, penelitian ini menggunakan air limbah pabrik tahu sebagai media kayu apu dengan tujuan melakukan analisis resiko lingkungan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Dany Trofisa, yang berjudul *Kajian Beban Pencemaran Dan Daya Tampung Pencemaran Sungai Ciliwung Di Segmen Kota Bogor*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemar di DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor, mengevaluasi perkembangan kondisi mutu air Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir di segmen Kota Bogor, menghitung besar beban pencemaran setiap sumber-sumber pencemar, menghitung besar daya tampung beban pencemaran. Dan penelitian yang lain dilakukan oleh Selly Widiastuty yang berjudul *Dampak Pengolahan Limbah Cair PT Pupuk Sriwidjaja Terhadap Kualitas Air Sungai Musi Kotamadya Palembang*. Dalam penelitian ini berisi tentang analisa dampak dari limbah cair PT Pupuk sriwijawa terhadap lingkungan khususnya terhadap kualitas air sungai musi yang menjadi tempat pembuangan limbah cair perusahaan pupuk tersebut.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, belum ada peneliti yang melihat partisipasi dari masyarakat dalam mengelola limbah produksinya. Sebagai

wujud pertanggungjawaban UKM batik kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, UKM batik seharusnya memiliki kepekaan yang tinggi untuk mengelola limbah produksinya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, serta partisipasi aktif UKM batik untuk sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam setiap proses pengelolaan limbah industrinya, demi terciptanya kelestarian lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu peneliti akan melengkapi kajian tentang limbah ini dengan meneliti partisipasi UKM batik laweyan dalam mengelola limbah produksinya, serta melihat hambatan apa yang muncul dalam partisipasi UKM batik laweyan dalam mengelola limbah produksinya.



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan suatu masalah, yaitu :

- a. Bagaimana partisipasi UKM batik di kecamatan laweyan Surakarta dalam mengelola limbah produksinya ?
- b. Bagaimana hambatan partisipasi UKM batik di kecamatan laweyan Surakarta dalam mengelola limbah produksinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui partisipasi UKM batik di kecamatan laweyan Surakarta dalam mengelola limbah produksi berdasarkan cara keterlibatan, intensitas dan frekuensi kegiatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam partisipasi UKM batik di kecamatan laweyan Surakarta dalam mengelola limbah produksinya dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat/UKM batik laweyan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai suatu masukan bagi pemerintah kota Surakarta untuk membuat sebuah kebijakan baru yang relevan dalam mengelola limbah UKM Batik Laweyan.

- b. Sebagai masukan kepada masyarakat atau UKM batik Laweyan serta FPKBL dalam bertindak untuk pengelolaan limbah produksi batik.
- c. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dan juga sebagai acuan yang dapat membantu para peneliti untuk melakukan penelitian sejenis selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu kajian teori yang memiliki banyak pengertian, banyak para ahli dari Indonesia maupun manca negara memaparkan pendapatnya tentang pengertian partisipasi, diantaranya yaitu:

Mubyarto dalam Taliziduhu Ndraha (1990 : 102) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Nagel, dalam Sudarmo (2011 : 85) mendefinisikan partisipasi secara lebih umum sebagai *actions through which ordinary members of a political system influence or attempt to influence outcomes*. (Tindakan-tindakan yang dilakukan para anggota sebuah sistem politik mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi hasil dari suatu tindakan). ‘Actions’ mengandung pengertian gerakan, tenaga dan usaha atau aktivitas yang ditujukan untuk mencapai suatu hasil. ‘Ordinary members’ dari sebuah system politik merupakan orang-orang non-elite yaitu siapa saja kecuali mereka yang menjalankan aktivitass sebagai kepala dalam pekerjaannya. ‘Influence’ mengandung pengertian bahwa para partisipan mencapai apa yang mereka tuntut untuk didapatnya karena mereka mendambakan untuk memperolehnya. Sebuah ‘political system’ didefinisikan secara luas sebagai struktur kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang terorganisir ; dan ‘outcome’

secara umum merupakan berbagai peristiwa yang dipengaruhi oleh para partisipan.

Mikkelsen, dalam Isbandi Rukminto Adi (2008 :106-108) mendefinisikan partisipasi dalam berbagai makna umum :

1. Partisipasi adalah kontribusi suka rela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan).
2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas local dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya membangun lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri.

Beberapa pengertian partisipasi diatas menurut Mikklesen kadangkala lebih merupakan kata-kata populer yang sering digunakan dan belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya (genuine participation). Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikklesen dalam Isbandi Rukminto Adi (2008 : 108) berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi.

Konsep partisipasi dalam Santoso Sastropetro (1986:54) dijelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang terkait dengan pembangunan, kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Moeljarto Tjokrowinoto (1999:47) mendefinisikan partisipasi dengan penyetaraan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk menyumbang ide, pikiran, dan perasaan yang terciptanya tujuan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tertentu.

Arie Halachmi (2011:8) berpendapat *From a pragmatic point of view, citizen participation may enhance public understanding of the reasons for an agency's ability (or inability) to attain higher levels of effectiveness, efficiency, legitimacy or a more prudent use of resources. Such improved understanding, in tum, may generate some of the necessary conditions for establishing government accountability, and thus tmst, in the public's eye.*

Arie Halachmi menekankan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat meningkatkan pengertian masyarakat kepada agency/birokrasi/pemerintah dalam upayanya mencapai tingkat yang lebih tinggi pada efektifitas, efisiensi, dan legitimasi, atau dalam penggunaan sumber daya secara lebih bijaksana.

Jadi bisa disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental, emosi, dan fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam usaha pencapaian tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan, dan disertai tanggung jawab.

B. Cara Menggerakkan Partisipasi

Partisipasi sebenarnya merupakan perasaan yang muncul dari dalam diri sendiri untuk mendorong dirinya agar ikut serta dalam suatu kegiatan. Walaupun sebenarnya merupakan dorongan diri sendiri, namun partisipasi dapat digerakkan agar masyarakat dapat lebih terdorong untuk berpartisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian di Jamaica, Goldsmith dan Blustain dalam Taliziduhu Ndraha (1990 : 105), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya control yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian Mubyarto di daerah pedesaan di Indonesia, sejalan dengan butir nomor 4 diatas. Dalam partisipasi masyarakat berlaku juga prinsip pertukaran dasar. Salah seorang pemuka teori pertukaran tersebut, Peter M. Blau berpendapat, bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu.

C. Indikator Partisipasi

Margono Slemet dalam Suminah dkk (2002: 86) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Ditambahkan juga, pada penelitiannya dalam menganalisis *Partisipasi Ibu-Ibu Peserta Dan Kader Dalam Kegiatan Posyandu Menyongsong Otonomi Daerah Di Desa-Desa Kabupaten Pati* tahun 2002, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud apabila terpenuhinya 3 faktor yang mendukung, yaitu:

1. Kemauan

Kemauan adalah aspek emosi dan perasaan terhadap suatu obyek tertentu yang berupa kecenderungan reaksi psikis yang timbul dari dalam diri manusia yang dapat menimbulkan motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan obyek tertentu.

2. Kemampuan

Kesanggupan seseorang untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan karena memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.

3. Kesempatan

Peluang yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

D. Jenis Partisipasi

Partisipasi pada dasarnya dapat di petakan menjadi beberapa jenis. Jenis partisipasi ini juga memiliki berbagai perspektif sudut pandang, sehingga terdapat berbagai macam jenis partisipasi. Jenis partisipasi ini mempermudah melihat pemetaan partisipasi masyarakat. Agus Dwiyanto (2005) membagi partisipasi menjadi 3 jenis, yaitu :

Tabel II.1 Jenis partisipasi

Jenis Partisipasi	Tingkat Keterwakilan	
	Sempit	Luas
Palsu	Keputusan: kurang transparan dibuat oleh pejabat publik. Partisipasi : simbolik, hanya segelintir orang yang terlibat.	Keputusan : dibuat oleh pejabat publik. Partisipasi : simbolik, meskipun melibatkan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat
Parsial	Keputusan : dibuat oleh sekelompok elit pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok kepentingan yang terbatas.	Keputusan : dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat sedikit dari partisipasi masyarakat.

	Partisipasi : hanya melibatkan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kesempatan sama sekali.	Partisipasi : melibatkan berbagai kelompok kepentingan namun peluang berpartisipasi disediakan dalam sesi yang sangat terbatas.
Penuh	Keputusan : dibuat oleh pejabat pemerintah dan kelompok kepentingan yang terpilih. Partisipasi : melibatkan kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh, namun sebagian besar warga negara tetap kurang memiliki kesempatan.	Keputusan : dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat kuat dari partisipasi masyarakat Partisipasi : masyarakat luas terlibat diskusi yang cukup intensif dengan pemerintah.

Sumber : Moynihan (2003:170)

E. Tipe Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu dasar teori yang memiliki arti luas, sebagai teori social partisipasi juga terus berkembang, dalam perkembangannya partisipasi dapat di bagi berdasarkan beberapa tipe partisipasi. Dusseldorp dalam Yulius Slamet, (1993:10) mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. Klasifikasinya didasarkan pada dasar,yaitu sebagai berikut :

commit to user

1. Berdasarkan derajat kesukarelaan

a. Partisipasi bebas

Terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibedakan mejadi :

- Partisipasi spontan

Terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan-ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

- Partisipasi terbujuk

Bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu.

Partisipasi ini dapat dibagi menurut siapa yang membujuk, yakni:

- Pemerintah yang mempropagandakan program prmbangunan masyarakat, gerakan koperasi LSM/LPSM atau HKTI
- Badan-badan sukarela diluar masyarakat itu misalnya gerakan-gerakan keagamaan
- Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau golongan organisasi sukarela yang berbasiskan dalam masyarakat seperti PKK kelompok tani dll.

b. Partisipasi terpaksa

Dapat terjadi dalam berbagai cara:

- Partisipasi terpaksa oleh hukum

Terjadi bila orang-orang terpaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.

- Partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi

2. Berdasarkan cara keterlibatan

a. Partisipasi langsung

Terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi seperti misalnya mengambil peranan didalam pertemuan-pertemuan, turut diskusi.

b. Partisipasi tidak langsung

Terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya pemilahan wakil-wakil didalam DPR.

3. Berdasarkan keterlibatan didalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana

a. Partisipasi lengkap

Bila seorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat didalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana.

b. Partisipasi sebagian

Bila seorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat didalam seluruh enam tahap itu.

4. Berdasarkan tingkat organisasi

Dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi yang terorganisasi

Terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan.

b. Partisipasi yang tidak terorganisasi

Terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang hukumnya karena keadaan yang gawat, misalnya sewaktu terjadi kebakaran.

5. Berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan

a. Partisipasi intensif

Terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas kegiatan partisipasi yang tinggi. Menurut muller hal ini diukur melalui dimensi kuantitatif dan partisipasi.

b. Partisipasi ekstensif

commit to user

Terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang.

6. Berdasarkan lingkup liputan kegiatan

a. Partisipasi tak terbatas

Yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawali oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas tertentu.

b. Partisipasi terbatas

Terjadi bila hanya sebagian kegiatan social, politik, atau administratif dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipasi.

7. Berdasarkan efektifitas

a. Partisipasi efektif

Yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktifitas partisipasi.

b. Partisipasi tidak efektif

Terjadi bila tidak satu pun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktifitas yang dicanangkan terwujudnya.

8. Berdasarkan siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Anggota masyarakat setempat : penduduk setempat, pemimpin setempat.
- b. Pegawai pemerintah : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk
- c. Orang-orang luar : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk.
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

Anggota-anggota dari berbagai kategori dapat diorganisir (partisipasi bujukan) atau dapat mengorganisir diri mereka berdasarkan dua prinsip, yaitu :

- a. Perwilayahan, sifatnya homogeny sejumlah masih menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.
- b. Kelompok-kelompok sasaran, sifatnya homogen, sejauh menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.

9. Berdasarkan gaya partisipasi

Roothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat didalam setiap model terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan perbedaan dalam gaya partisipasi.

- a. Pembangunan loyalitas

Model praktek organisasi ini sama dengan masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang didalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energy social yang dapat mengaruh

commit to user

pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta mempunyai fungsi integrative.

b. Perencanaan sosial

Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif. Partisipasi didalam perencanaan social dapat dicirikan seperti yang disebutkan oleh Arstein sebagai informan atau placatiaon. Akan tetapi adalah juga bahwa partisipasi berkembang ke dalam bentuk partnership atau perwakilan kekuasaan.

c. Aksi sosial

Tujuan utama dari tipe partisipasi ini adalah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan partisipasi diantaranya kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-maksud yang penting.

F. Cara Pandang Partisipasi Efektif

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Maureen M Berner, Justin M Amos, dan Ricardo S Morse, yang berjudul *What Constitutes Effective Citizen.*

commit to user

Participation In Local Government? Views From City Stakeholders pada tahun 2011. Mereka menunjukkan partisipasi masyarakat yang efektif dipandang dalam berbagai cara, atau dalam dimensi yang berbeda, tergantung pada posisi pemangku kepentingan sebagai pejabat terpilih, anggota staf atau warga negara. Ada beberapa kesepakatan umum, seperti partisipasi yang bermakna dan tidak simbolik. Di lain daerah, seperti bagaimana partisipasi efektif (secara langsung atau tidak langsung), ada perbedaan pemangku kepentingan yang berbeda kelompok.

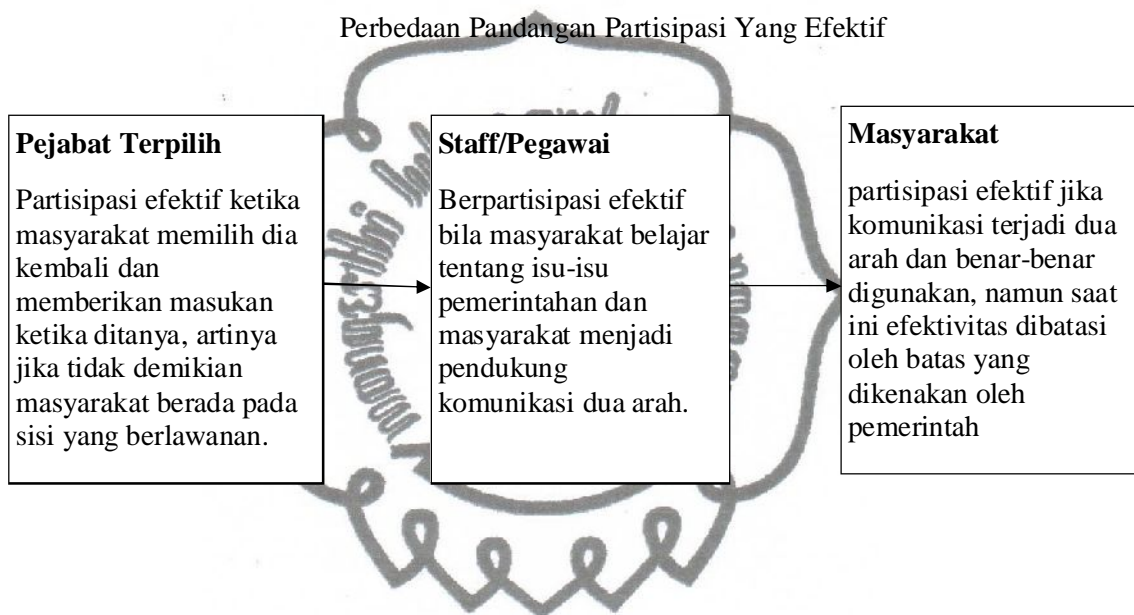
Dengan kata lain, pejabat terpilih cenderung untuk mendefinisikan partisipasi warga negara yang efektif dengan terpilihnya dia kembali sebagai pejabat dan sedikitnya keluhan dari masyarakat.

Bagi staf, partisipasi warga negara yang efektif berarti memberikan informasi kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk bertindak sebagai komunitas pendukung tingkat makro dan dengan demikian membuat warga sebagai sumber daya informasi berharga untuk mendapatkan anggota masyarakat lain untuk memahami sesuatu yang sulit, kontroversial atau keputusan mendesak yang dibuat oleh pejabat setempat.

Warga melihat partisipasi efektif melalui pandangan berbeda. Secara keseluruhan, warga percaya system partisipasi yang efektif harus mencakup dua arah komunikasi (antara ketiga kelompok stakeholder), lebih banyak kesempatan untuk didengar lebih awal, pada proses atau perencanaan, bukan pada sidang

umum anggaran, dan keterlibatan dalam dialog yang jujur dengan pejabat staff dan pejabat terpilih tentang anggaran dan peran mereka dalam proses.

Gambar II. 1



G. Hambatan-Hambatan Dalam Partisipasi

Dalam partisipasi terdapat banyak kendala yang berpotensi menghambat jalannya partisipasi. Hambatan ini muncul baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Menurut Agus Dwiyanto (2005) hambatan yang dapat muncul dari pemerintah dan masyarakat itu adalah:

Dari pihak pemerintah, kendala yang muncul dapat berupa:

commit to user

1. Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik.
2. Lemahnya dukungan SDM yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
3. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat.
4. Lemahnya dukungan anggaran. Karena kegiatan peningkatan partisipasi publik sering kali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran secara berkelanjutan. Akibatnya, kegiatan partisipasi hanya berjalan beberapa saat dan selanjutnya penyelenggaraan pelayanan publik akan kembali kepada praktik-praktik lama seperti pada saat program peningkatan partisipasi belum dilakukan.

Dari pihak masyarakat, kendala yang muncul dapat berupa:

1. Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat selama ini menyulitkan manakala mereka diminta untuk melakukan diskusi terbuka dengan para pejabat publik yang mereka anggap menduduki posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat, apalagi jika harus melakukan kritik secara terbuka kepada pejabat publik pada waktu dialog publik.

2. Apatisme. Karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah maka mereka menjadi bersikap apatis. Kondisi ini akan menyulitkan ketika pemerintah melakukan inisiatif untuk mengajak mereka berpartisipasi.
3. Tidak adanya trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. pengalaman masa lalu di mana masyarakat hanya dijadikan objek pemerintah, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

H. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Isu Lingkungan

Esensi dari tanggung jawab social atau CSR menurut Reza Rahman (2009: 10) merupakan wujud dari *giving back* dari perusahaan kepada komunitas (*stakeholders*). Perihal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif bagi *stakeholders*.

Tanggung jawab social ini dapat dilakukan dengan berbagai macam aktivitas. Berdasar survey yang dimuat pada majalah MIX 03/17 Maret-13 April 2008 dalam Reza Rahman (2009:18), berikut adalah sejumlah aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia:

1. *Product support* : Membuat produk yang aman, dll
2. *Environment support*: Menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.

3. *Employee Support*: Perlindungan tenaga kerja, intensif, dan penghargaan, serta jaminan keselamatan kerja.
4. *Diversity*: Kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender, fisik, dan ras.
5. *Community support*: Mendukung program pendidikan, kesehatan, dll.

Tanggung jawab social atau CSR dan pembangunan keberlanjutan menjadi sangat penting, jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Tuntutan melakukan CSR menjadi tidak terelakkan, ketika fakta menunjukkan bahwa fakta korporat terhadap sumber daya alam (SDA) mencapai 30 % dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan.

Dunia kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hutan tropis semakin menipis, kepunahan binatang langka, polusi udara, dan perubahan iklim. Penghematan dalam penggunaan SDA dan pemakaian bahan daur ulang, sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membuat usaha di daerah yang tetap bersangkutan tetap dapat berlanjut.

Tujuan dari kegiatan CSR terkait pada pengurangan dampak buruk perusahaan, dan penggunaan SDA sesuai dengan kapasitas alam. Berikut adalah sejumlah focus isu yang dapat dijadikan pilihan dalam penyusunan program CSR:

1. *Global Warming*

commit to user

Lembaga bisnis, sebagai salah satu penyumbang terjadinya *Global Warming*, wajib turut andil dalam menangani masalah ini. Misalnya seperti program *Green and Clean* yang dipelopori oleh univeler.

2. Kesehatan

Kondisi perekonomian yang lemah ditandai dengan masih banyaknya rakyat miskin, menjadikan isu kesehatan sebagai pusat perhatian yang tidak boleh terlewatkan. Kegiatan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan mutlak dilakukan. Aktivitas CSR seperti yang dilakukan lifebuoy dengan kampanye cuci tangan patut dijadikan contoh perusahaan lain.

3. Pelestarian Hutan Tropis

Indonesia yang sempat dijuluki zamrud khatulistiwa kini menjadi negara pengekspor asap ke negara tetangganya. Sejumlah pengamat kehutanan memprediksi jika kebakaran dan pembalakan liar ini terus-menerus tanpa penanganan yang serius bisa dalam 30 tahun ke depan, hutan Indonesia akan ludes.

4. Penghematan Air

Air di sejumlah negara di Amerika, Eropa, dan Australia kian susut. Gerakan pembatasan penghematan air melalui regulasi yang tegas di praktikkan oleh pemerintah di negara-negara tersebut bahkan sampai pembatasan waktu untuk mengkonsumsi keseharian seperti mandi, mencuci mobil, dan menyiram tanaman. Meskipun kondisi semacam

itu belum terjadi di Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat hal yang sama akan terjadi apabila kebiasaan penggunaan air yang berlebihan seperti sekarang. (Reza Rahman 2009: 44-50)

I. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM)

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

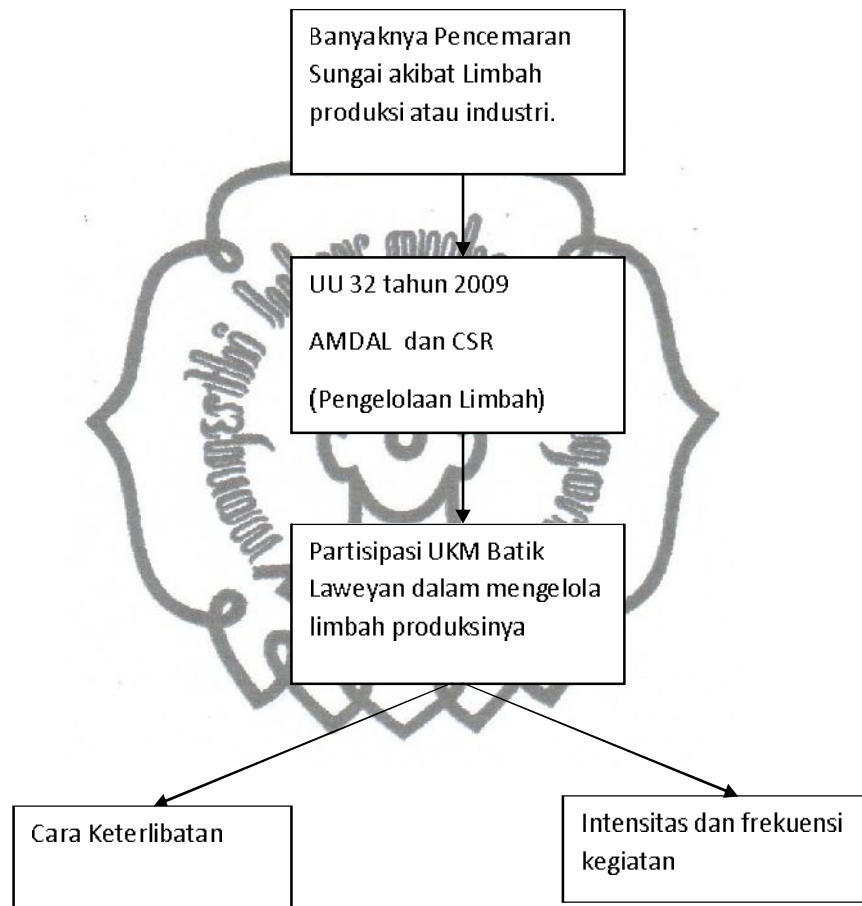
Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Aset lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan/omset lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Aset lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan/omset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

J. Pengertian Batik

Kata “batik” berasal dari kata bersuku tunggal “tik”. Kata “tik” berarti “titik”. “Batik” berarti bertitik. Membatik berarti membuat bertitik. Memang kain batik adalah kain yang diukir dengan garis-garis dan titik-titik. Titik ini disebut “cecek” adalah bagian penting dari batik. Pada dasarnya membatik itu adalah melukis juga. Hanya melukis dilakukan diatas pakaian, kwasnya adalah canting dan catnya adalah lilin. Motifnya diambil dari bahan-bahan yang indah dari alam. (Chandra Irawan Soekamto 1986: 8)

K. Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir dalam penelitian ini berangkat dari adanya terjadinya pencemaran pada daerah aliran sungai (DAS) di berbagai daerah. Pencemaran yang terjadi pada DAS ini memberikan berbagai dampak negative bagi masyarakat sekitarnya. Adanya pencemaran ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dibuatnya UU no 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup, serta mendorong dibuatnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diperuntukkan kepada para pengusaha agar melakukan kegiatan usahanya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu adapula Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan bentuk tanggung jawab pengusaha/perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, CSR ini bisa diwujudkan salah satunya dengan pengelolaan limbah secara optimal, agar tidak berbahaya atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan berpijak pada UU no 32 tahun 2009, AMDAL, dan CSR, maka setiap pengusaha dituntut untuk berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan limbah produksinya. Termasuk para pengusaha batik berskala kecil dan menengah di kecamatan Laweyan Surakarta. Dimana di kota Surakarta sendiri pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat limbah industri batik yang tidak dikelola dengan baik sudah mulai mengkhawatirkan.

Maka untuk melihat bagaimana partisipasi Usaha Kecil Menengah (UKM) batik yang ada di kecamatan laweyan peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 2 tipe partisipasi, yaitu tipe partisipasi berdasarkan cara keterlibatan, serta intensitas dan frekuensi kegiatan dalam partisipasi pengelolaan limbah industri UKM batik tersebut. Selanjutnya akan dapat diketahui bagaimana kekurangan dan kelebihan partisipasi UKM batik dalam mengelola limbah, yang dapat dijadikan pijakan untuk memperbaiki konsep pengelolaan limbah yang sudah ada, ataupun membuat konsep atau gagasan pengelolaan limbah yang baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian tentang partisipasi UKM batik dalam mengelola limbah industrinya adalah kecamatan laweyan Surakarta. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah, pada kecamatan laweyan terdapat daerah-daerah sentra industri batik yang di dominasi oleh UKM, yaitu di kelurahan Laweyan, Pajang, Sondakan, dan Bumi.

Selain itu, kecamatan laweyan merupakan ikon industri batik di Surakarta yang memiliki sejarah panjang. Ditengah-tengah kecamatan laweyan terdapat sungai Jenes. Sungai Jenes merupakan sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah UKM Batik Laweyan dan telah tercemar limbah produksi batik. Sehingga dengan adanya banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) batik dan sungai jenes yang menjadi tempat pembuangan limbah batik, diharapkan penelitian yang dilakukan akan memperoleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan.

B. Bentuk Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tipe partisipasi UKM batik dalam pengelolaan limbah produksinya. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk

mengetahui persoalan tersebut adalah pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penggambaran secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. (H.B. Sutopo 2002:111)

Penggambaran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu mengenai partisipasi UKM Batik dalam mengelola limbah produksinya berdasarkan cara keterlibatan, intensitas dan frekuensi, serta hambatan yang dalam partisipasi UKM Batik tersebut.

C. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data. Atas dasar itu, berbagai pertanyaan dalam penelitian kualitatif menggunakan kata bagaimana dan mengapa sebagai usaha untuk mendeskripsikan jawaban mengenai proses. Dalam kaitannya dengan hal itu, tidak berarti dalam penelitian kualitatif tidak boleh bertanya tentang apa/siapa, berapa,dimana. Namun, pertanyaan semacam itu bukan merupakan penekanan fokus dalam penelitian kualitatif. (HB Sutopo,2002:36)

Purposive sampling menurut Susanto (2006:120) adalah teknik penentuan sample untuk tujuan tertentu saja. Sample ditentukan berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Peneliti dengan sengaja menentukan anggota sampelnya berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya tentang keadaan populasi. Pengertian sengaja disini adalah bahwa peneliti telah menentukan responden dengan anggapan atau pendapatnya sendiri sebagai sample penelitiannya, peneliti tahu persis siapa yang akan dipilih sebagai sample.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang partisipasi UKM batik dalam mengelola limbah produksinya, maka sample yang dipilih adalah UKM batik yang melakukan partisipasi pengelolaan limbah dan pihak-pihak lain yang ahli atau berkompeten tentang permasalahan ini, seperti UKM batik di Kecamatan Laweyan, kepala BLH Surakarta yang mempunyai salah satu tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan limbah, lalu ketua FPKBL yang merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi para pengusaha batik laweyan, serta masyarakat sekitar lokasi UKM berproduksi yang juga mengetahui bagaimana partisipasi dari UKM dalam mengelola limbah produksinya.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa manusia (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, dokumen, dan arsip (HB. Sutopo 2002:49- 54). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan

Data diperoleh secara langsung dari informan / narasumber yang dianggap benar-benar mengetahui tentang permasalahan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah

- a. UKM Batik Laweyan
- b. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surakarta
- c. Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan (FPKBL)
- d. Masyarakat sekitar tempat produksi UKM Batik.

2. Aktivitas atau peristiwa

Aktivitas yang memungkinkan untuk dijadikan sumber data penelitian ini bisa berupa:

- a. Aktivitas rutin yang berulang ataupun yang hanya satu kali terjadi.
- b. Aktivitas yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja.
- c. Aktivitas formal ataupun non formal.

3. Dokumen dan arsip

Dokumen dan arsip diperoleh dari bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen dan arsip yang digunakan dalam

penelitian ini adalah berbagai literatur-literatur baik dari buku serta media massa (cetak ataupun elektronik) yang relevan dengan tujuan penelitian.

4. Gambar

Data berupa gambar atau foto-foto yang berkaitan dengan penelitian partisipasi UKM Batik laweyan dalam mengelola limbah produksinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Menurut Susanto (2006:128) wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan atau responden dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi untuk menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi secara lebih mendalam mengenai partisipasi UKM Batik laweyan dalam mengelola limbah produksinya. Selain itu juga menggunakan telaah dokumen untuk menggali data seperti dokumen tentang permasalahan pengelolaan limbah produksi batik di Surakarta.

F. Validitas Data

Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi. Peneliti memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti bisa memperoleh informasi dari informan yang berbeda-beda posisinya atau dari berbagai perspektif sudut pandang, dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber yang lain. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda (H.B.Sutopo 2002: 91).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa UKM batik laweyan, masyarakat sekitar tempat produksi UKM batik laweyan, ketua FPKBL, dan kepala BLH Surakarta. Dengan menggali informasi dari berbagai perspektif sudut pandang ini dimaksudkan untuk mendapatkan data/informasi yang valid dan peneliti akan berhenti bertanya setelah mendapatkan pengulangan jawaban/informasi yang sama dari informan yang berbeda atau dengan kata lain data yang di dapatkan sudah jenuh.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif. Teknik ini tepat digunakan bagi penelitian yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif ini, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 2002: 94). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditentukan dan pengambilan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis.

a. Reduksi data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada. Berfungsi untuk mempertegas, memperpendek, dan membuang hal-hal tidak penting atau tidak diperlukan dalam penelitian ini.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai tipe partisipasi UKM Batik laweyan dalam mengelola limbah industrinya berdasarkan cara

keterlibatan, serta intensitas dan frekuensi kegiatan. Data dan informasi yang tidak berhubungan dengan penelitian ini akan dibuang oleh peneliti.

b. Sajian Data

Data yang telah terkumpul disajikan dalam sistematika atau struktur yang baik, sehingga mudah dimengerti dan dapat mempermudah pengambilan kesimpulan. Penyajian data harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan dengan demikian akan mampu membantu penarikan kesimpulan.

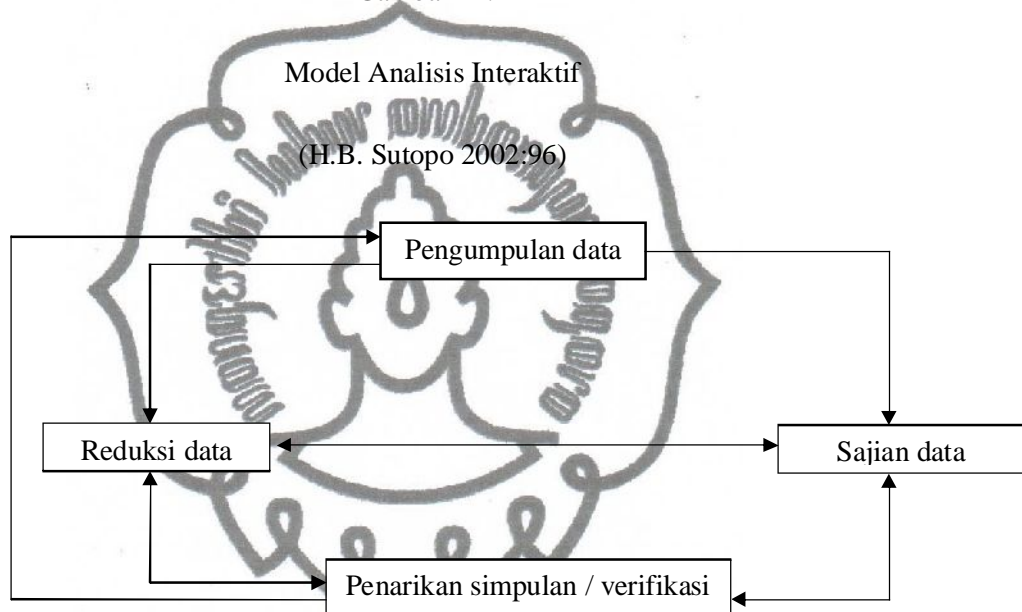
Dalam penelitian ini setelah data yang akan diperoleh dari UKM batik laweyan, masyarakat sekitar UKM Batik, Ketua FPKBL, dan kepala BLH Surakarta, akan diseleksi, diambil data-data yang sekiranya diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dalam rangka menjawab bagaimana partisipasi UKM batik dalam mengelola limbah produksinya, serta menjawab hambatan apa saja yang terdapat dalam partisipasi UKM Batik dalam mengelola limbah tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga mempermudah untuk memahaminya maka setelah itu dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai tentang penelitian tersebut. Kesimpulan yang diambil ini dapat di cocokkan kembali dengan data yang diperoleh atau pada tahap reduksi data lagi, apakah kesimpulan yang diambil sudah sesuai atau belum.

Proses dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan ini terus berputar menjadi sebuah siklus dan membentuk analisis interaktif. Bila digambarkan dalam skema adalah sebagai berikut:

Gambar III.1



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Laweyan

Laweyan atau Laweyan adalah kecamatan yang terletak di barat kota Surakarta. Kecamatan ini terkenal karena penduduknya banyak yang menjadi produsen dan pedagang batik, sejak dulu sampai sekarang. Di sinilah tempat berdirinya Sarekat Dagang Islam, asosiasi dagang pertama yang didirikan oleh para produsen dan pedagang batik pribumi, pada 1912.

Kecamatan Laweyan memiliki luas wilayah yang tidak begitu besar, jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan lain di Surakarta, kecamatan Laweyan memiliki luas wilayah 8,64 km², yang berbatasan langsung dengan kecamatan Serengan dan Banjarsari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2011, jumlah penduduk kecamatan Laweyan adalah 111.767 jiwa, dengan 54.834 penduduk laki-laki, 56.933 penduduk perempuan, sehingga memiliki kepadatan penduduk 12.936 jiwa/km², dan terbagi dalam 11 kelurahan, Penumping, Purwosari, Sriwedari, Kerten, Jajar, Karangasem, Sondakan, Pajang, Laweyan, Bumi, dan Panularen.

Sebagai kecamatan yang memiliki sejarah panjang perdagangan batik di Indonesia, kecamatan Laweyan memiliki beberapa daerah sentra produksi batik yang terletak di kelurahan Pajang, Bumi, Sondakan, dan Laweyan, dengan ikon

kampung batik Laweyan sebagai daerah wisata yang terkenal hingga manca negara, serta menjadi salah satu roda perekonomian kota Surakarta dengan produksi Batiknya yang sudah mencapai pasar nasional dan internasional.

2. Tinjauan Umum Kampung Batik Laweyan

Kota Surakarta merupakan kota yang identik dengan kesenian dan kebudayaan lokalnya, salah satu yang paling dikenal dari kota Solo adalah batiknya. Terdapat dua tempat sebagai produsen batik terbesar di kota Surakarta yakni Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman, namun peneliti melihat Kampung Batik Laweyan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat Kelurahan Laweyan yang merupakan kampung batik tertua di Indonesia dan memiliki sejarah panjang.

a. Sejarah

Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik yang unik, spesifik dan bersejarah. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh R.T. Mlayadipuro desa Laweyan (kini Kampong Laweyan) sudah ada sebelum munculnya kerajaan Pajang. Sejarah Laweyan barulah berarti setelah Kyai Ageng Hanis bermukim di desa Laweyan. Pada tahun 1546 M, tepatnya di sebelah utara pasar Laweyan (sekarang Kampung Lor Pasar Mati) dan membelakangi jalan yang menghubungkan antara Mentaok dengan desa Sala (sekarang jalan Dr. Rajiman). Kyai Ageng Henis adalah putra dari Kyai

Ageng Sela yang merupakan keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Henis atau Kyai Ageng Laweyan adalah juga “manggala pinatuwaning nagara” Kerajaan Pajang semasa Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang pada tahun 1546.

Setelah Kyai Ageng Henis meninggal dan dimakamkan di pasarean Laweyan (tempat tetirah Sunan Kalijaga sewaktu berkunjung di desa Laweyan), rumah tempat tinggal Kyai Ageng Henis ditempati oleh cucunya yang bernama Bagus Danang atau Mas Ngabehi Sutowijaya. Sewaktu Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) pada tahun 1568 M Sutowijoyo lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar (Pasar Laweyan). Kemudian Sutowijaya pindah ke Mataram (Kota Gede) dan menjadi raja pertama Dinasti Mataram Islam dengan sebutan Panembahan Senopati yang kemudian menurunkan raja – raja Mataram.

Masih menurut RT. Mlayadipuro Pasar Laweyan dulunya merupakan pasar Lawe (bahan baku tenun) yang sangat ramai. Bahan baku kapas pada saat itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Juwiring, dan Gawok yang masih termasuk daerah Kerajaan Pajang.

Adapun lokasi pasar Laweyan terdapat di desa Laweyan (sekarang terletak diantara kampung Lor Pasar Mati dan Kidul Pasar Mati serta di sebelah timur kampung Setono). Di selatan pasar Laweyan di tepi sungai

Kabananan terdapat sebuah bandar besar yaitu bandar Kabananan. Melalui bandar dan sungai Kabananan tersebut pasar Laweyan terhubung ke bandar besar Nusupan di tepi Sungai Bengawan Solo.

Pada jaman sebelum kemerdekaan kampung Laweyan pernah memegang peranan penting dalam kehidupan politik terutama pada masa pertumbuhan pergerakan nasional. Sekitar tahun 1911 Serikat Dagang Islam (SDI) berdiri di kampung Laweyan dengan Kyai Haji Samanhudi sebagai pendirinya. Dalam bidang ekonomi para saudagar batik Laweyan juga merupakan perintis pergerakan koperasi dengan didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik Boemi Putera Soerakarta” pada tahun 1935.

b. Sosial Budaya

Dulu terdapat pengelompokan sosial dalam kehidupan masyarakat Laweyan, yaitu kelompok wong saudagar (pedagang), wong cilik (orang kebanyakan), wong mutihan (Islam atau alim ulama) dan wong priyayi (bangsawan atau pejabat). Selain itu dikenal pula golongan saudagar atau juragan batik dengan pihak wanita sebagai pemegang peranan penting dalam menjalankan roda perdagangan batik yang biasa disebut dengan istilah mbok mase atau nyah nganten. Sedang untuk suami disebut mas nganten sebagai pelengkap utuhnya keluarga.

Sebagian masyarakat Laweyan masih tampak aktif nguri – uri (melestarikan) kesenian tradisional seperti musik keroncong dan karawitan yang biasanya ditampilkan (dimainkan) sebagai pengisi acara hajatan seperti mantenan, sunatan, tetakan, dan kelahiran bayi.

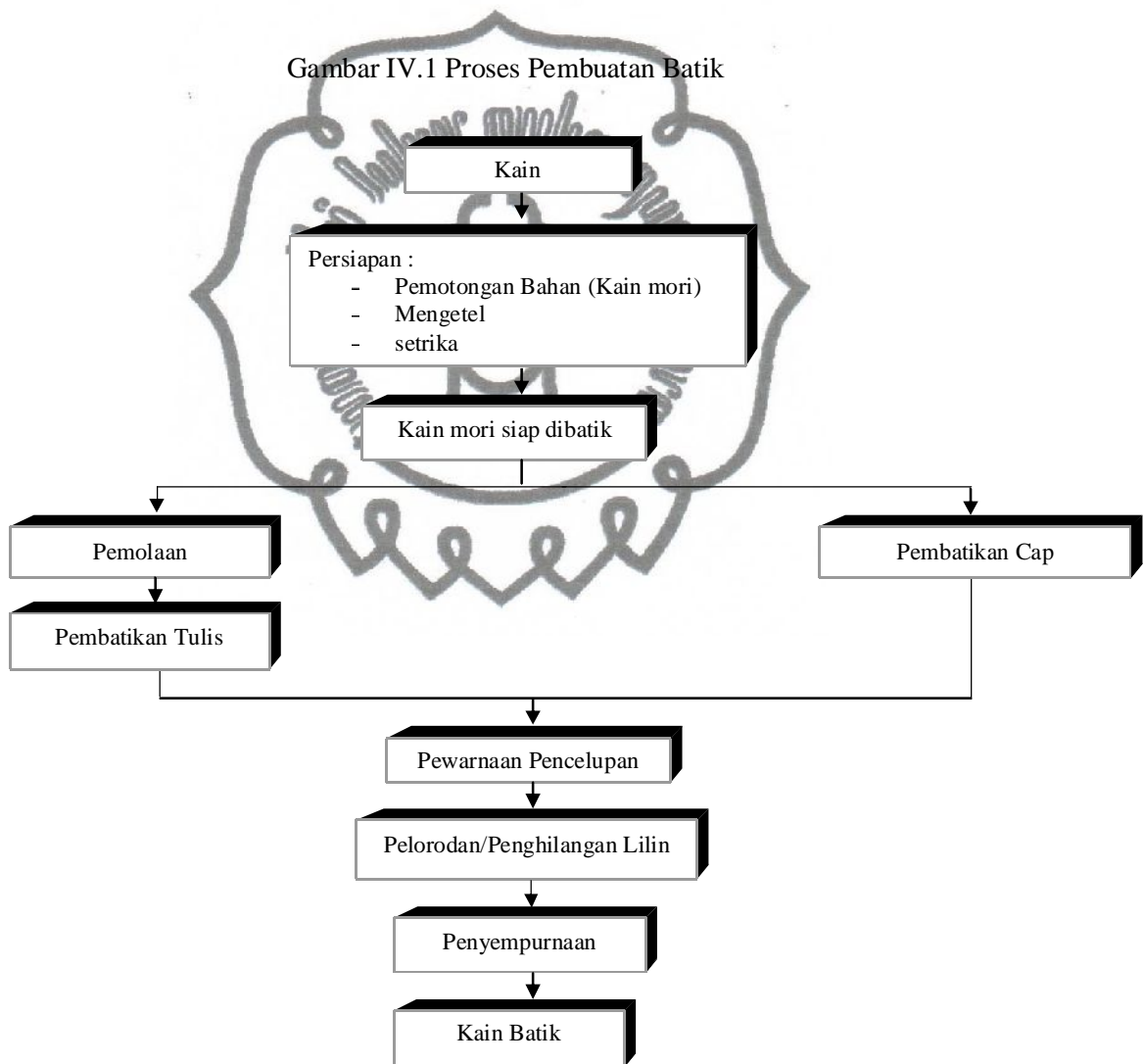
Dalam bidang keagamaan, sebagian besar penduduk Laweyan beragama Islam terlihat aktif menyelenggarakan kegiatan – kegiatan keagamaan, seperti pengajian, tadarusan, semakan dan aktivitas – aktivitas keagamaan lainnya, baik secara terjadwal maupun insidental.

c. **Produksi Batik Laweyan**

Kampung batik Laweyan yang merupakan salah satu tujuan pariwisata di Surakarta tentu saja menawarkan beraneka ragam hal menarik di dalamnya, diantaranya pengunjung dapat langsung menyaksikan proses pembuatan batik dan *show room* pada tempat yang sama, dengan nuansa kuno dibalut kentalnya budaya dan arsitektur jawa yang masih lestari di kampung batik Laweyan. Dari data FPKBL, terdapat 66 *show room*, namun yang melakukan proses produksi batik hanya 26 UKM, data lengkapnya terdapat pada lampiran penelitian ini.

Dalam pembuatan sebuah kain batik, memerlukan beberapa proses produksi yang cukup lama. Dimulai dari selembur kain mori putih yang diolah menjadi sebuah kain batik berwarna dan bermotif khas kota Surakarta. Pada

era modern kini, pewarna kain yang digunakan dalam produksi batik tidak lagi menggunakan pewarna alam, melainkan pewarna kimia yang menghasilkan limbah yang tidak ramah lingkungan. Berikut adalah bagan mengenai proses pembuatan batik.



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang bagaimana partisipasi UKM batik di kecamatan Laweyan dalam mengelola limbah industrinya, peneliti menggunakan teori Dusseldorp dalam Yulius Selamet (1993:10), dalam teori tersebut terdapat 9 tipe partisipasi, namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 2 tipe partisipasi yang dianggap relevan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan cara keterlibatan serta frekuensi dan intensitas kegiatan.

Pengambilan 2 tipe partisipasi tersebut karena pada tipe partisipasi yang disampaikan oleh Dusseldorp merupakan tipe partisipasi kegiatan social, sedangkan dalam penelitian ini merupakan partisipasi yang berkaitan dengan bisnis, jadi tidak semua tipe partisipasi social dapat di masukkan pada partisipasi bisnis. Selain itu dengan 2 tipe partisipasi tersebut sudah dapat menggambarkan bagaimana partisipasi UKM batik Laweyan dalam mengelola limbahnya. Secara lebih jelas mengenai pembahasan tentang partisipasi UKM batik laweyan dalam mengelola limbah industrinya, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Cara Keterlibatan

Berkaitan dengan masalah partisipasi, saya sebagai peneliti ingin melihat bagaimana partisipasi para UKM (Usaha Kecil Menengah) Batik di kecamatan Laweyan Surakarta dalam mengelola limbah industrinya. Berangkat dari adanya permasalahan tentang masih adanya pencemaran lingkungan sekitar industri Batik

laweyan, yang salah satunya disebabkan limbah dari industri batik yang masih belum terkelola dengan baik, pencemaran terutama terjadi pada sungai Jenes yang melintasi kecamatan Laweyan (Lihat lampiran gambar 2). Masalah pencemaran ini merupakan masalah yang merupakan ranah permasalahan publik, karena terjadinya pencemaran pada aliran sungai Jenes akan mengganggu atau membawa dampak negative terhadap masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Untuk dapat mengurangi pencemaran tersebut tentu saja pengelolaan limbah UKM batik perlu ditingkatkan, agar limbah yang dibuang pada media lingkungan merupakan limbah yang aman bagi lingkungan dan masyarakat.

Cara keterlibatan yang dimaksud disini adalah melihat bagaimana UKM batik di Laweyan melibatkan dirinya dalam rangka mengelola limbah serta mengurangi pencemaran yang terjadi di lingkungan industrinya. Dusseldrop dalam Yulius Selamat (1993:10), membagi cara keterlibatan menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Cara keterlibatan secara langsung terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi seperti misalnya mengambil peranan didalam pertemuan-pertemuan, turut diskusi, melengkapi surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan, dan melakukan tindakan mengelola limbah industrinya agar aman dibuang pada media lingkungan. Sedangkan secara tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya pemilihan wakil-wakil didalam DPR.

Tipe partisipasi ini memang terbukti ada di dalam partisipasi UKM batik laweyan dalam mengelola limbahnya, namun hanya cara keterlibatan secara langsung yang dilakukan oleh UKM batik laweyan. Cara keterlibatan UKM batik dalam mengelola limbah industrinya sebenarnya bisa dimulai sejak awal pembentukan usaha batik itu sendiri, terkait dengan adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha sebelum mendirikan usaha batiknya. Peraturan yang pasti ada dalam setiap pendirian usaha tentu saja terkait dengan ijin usaha atau rekomendasi lingkungan.

Pada kalangan pengusaha batik laweyan, kepemilikan ijin usaha atau rekomendasi lingkungan ini ditanggapi dengan berbagai alasan, dengan bekal pengetahuan beragam yang dimiliki oleh masing-masing pengusaha. Para pengusaha batik Laweyan sebenarnya masih belum mempunyai kesepahaman atau belum memiliki satu suara yang sama tentang surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan yang bersifat wajib dan diatur dalam Undang-Undang, ini menimbulkan para pengusaha batik Laweyan cenderung salah memahami atau bahkan tidak tahu apa itu ijin usaha atau rekomendasi lingkungan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Arif Wicaksono, beliau merupakan pemilik industri batik 'Gress Tenan' di kampung batik laweyan, beliau berpendapat:

“Ada peraturan khusus untuk yang memproduksi batik, kalau yang hanya *showroom* saja itu bebas, asalkan rumahnya dibongkar, dijadikan toko sudah boleh. Kalau yang untuk produksi batik itu ada ijin tentang saluran limbahnya, lalu ada ijin untuk karyawan yang dari luar laweyan, ada juga ijin untuk karyawan yang menginap dirumah, itu semua ijinnya ke Forum (FPKBL), pokoknya istilahnya ya buat cari aman lah, ijinnya ya cuma sama Forum itu, kalau sama pemerintah sama sekali tidak ada ijin, kan

commit to user

UKM itu memang tidak ada ijin. Selain itu usaha batik saya ini berdiri sudah sangat lama, sejak tahun 1923, bapak saya itu generasi ke 4, dan saya generasi ke 5, sebelum ada peraturan itu usaha ini sudah ada” (Wawancara 23 November 2012)

Sebagai pemilik salah satu industri batik tertua di Laweyan, bapak Arif Wicaksono tidak merasa mempunyai kewajiban untuk memiliki surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan, karena usia industri yang lebih tua dari peraturan memiliki rekomendasi lingkungan tersebut, lalu kesalahan persepsi tentang ijin usaha atau rekomendasi lingkungan yang sebenarnya merupakan kewajiban semua kalangan industri, diartikan sebagai kewajiban bagi industri yang berskala besar saja. Pengusaha batik yang lain di laweyan yang berada di luar kawasan kampung batik juga berpendapat hampir serupa dengan Bapak Arif wicaksono, Bapak Angga yang merupakan pemilik dari ‘Batik Egi’, beliau mengatakan :

“Sebenarnya ada peraturan-peraturan khusus, tapi kan itu untuk PT (Perseroan Terbatas), kalau punya saya kan bukan PT, karena cuma orang sedikit, masih CV kalau punya saya ini, kalau PT kan karyawannya uda 50 orang lebih, jadi harus mengurus ijin sama pemerintah, kalau punya saya kan karyawannya cuma 10 orang.” (Wawancara 24 November 2012)

Pengertian dan pemahaman yang salah oleh para pengusaha batik tentang surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan ini memang disebabkan karena faktor keterbatasan pengetahuan mereka tentang hal tersebut. Keterbatasan pengetahuan pengusaha batik tentang regulasi yang mengatur aktivitas usaha mereka memang membuat mereka terkesan ‘acuh’ dengan regulasi yang ada, atau ada pula yang sebenarnya mengetahui, tapi masih enggan untuk melakukan atau memenuhi

regulasi tersebut, karena memang tidak membuat perbedaan terhadap aktivitas industrinya, Seperti Bapak Rudi, pemilik ‘Batik Mutiara’, beliau berpendapat:

“Yang saya tau ada ijin mendirikan usaha, tapi saya tidak punya, kalau peraturan-peraturan yang lain saya belum tau, yang jelas dulu pemerintah pernah berjanji akan mendirikan asosiasi pengusaha batik pajang laweyan, tapi sampai sekarang belum terealisasi.” (wawancara 27 November 2012)

Memang jumlah pengusaha yang tidak memiliki surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan masih dominan. Tidak adanya perbedaan perlakuan antara pengusaha yang memiliki rekomendasi lingkungan dengan pengusaha yang tidak memiliki rekomendasi lingkungan menjadikan regulasi ini bukan hal yang wajib bagi para UKM batik Laweyan.

Mengingat bahwa ijin usaha atau rekomendasi lingkungan ini merupakan instrument awal untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah, tentu saja membuat limbah yang seharusnya mulai terkontrol dari tahap awal ini menjadi lebih leluasa untuk dibuang langsung di media lingkungan. Partisipasi pengusaha dalam hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap langkah pengelolaan limbah selanjutnya.

Pengusaha batik yang memiliki ijin usaha atau rekomendasi lingkungan dapat dipastikan bahwa usaha tersebut memiliki nama yang legal dan sah, serta usaha yang dimilikinya memiliki proses pengelolaan limbah yang selangkah lebih maju dari pada yang lain. Bapak Bambang Slameto pemilik batik ‘Merak Manis’ merupakan salah satu pengusaha batik yang memiliki surat ijin usaha atau rekomendasi

lingkungan, beliau mengatakan “kalau peraturan paling ya ijin usaha, saya punya sudah dari dulu, sudah lama, lainnya tidak ada, ijin kepada forum juga tidak ada” (wawancara 26 November 2012)

Ijin usaha yang dimiliki oleh Bapak Bambang memang merupakan contoh bagi para pengusaha batik laweyan, walaupun bersekala UKM, bapak Bambang sudah lama melengkapi ijin usahanya. Disamping menjadi pengusaha Batik, bapak Bambang juga pernah menjadi seorang dosen di sebuah Universitas Negeri, sehingga sedikit banyak beliau paham tentang kepemilikan ijin usaha.

Memastikan kepemilikan surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan semua UKM, termasuk UKM batik Laweyan memang juga merupakan salah satu peran BLH Surakarta, seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLH (Badan Lingkungan Hidup) Surakarta, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si :

“Peran BLH terkait pencemaran limbah industri, kalau berdasarkan Undang-Undang nomer 32, tugas BLH itu hanya 3, melakukan upaya pencegahan, upaya penanggulangan, dan upaya pemulihan. Kalau upaya pencegahan kita melakukannya dari beberapa instrument, misalnya dalam setiap pendirian usaha itu wajib dilengkapi ijin lingkungan atau rekomendasi lingkungan atau ijin usaha. Kalau usahanya besar, namanya AMDAL, kalau usahanya sedang namanya UKL-UPL, kalau usahanya kecil namanya SPPL, itu merupakan instrument pencegahan.” (wawancara 8 November 2012)

Melihat pada hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan pada UKM batik Laweyan, usaha BLH dalam melakukan upaya pencegahan melalui peraturan-peraturan atau yang biasa disebut instrument-instrumen tersebut masih belum dapat dipenuhi atau dilaksanakan dengan baik oleh UKM batik yang ada kecamatan

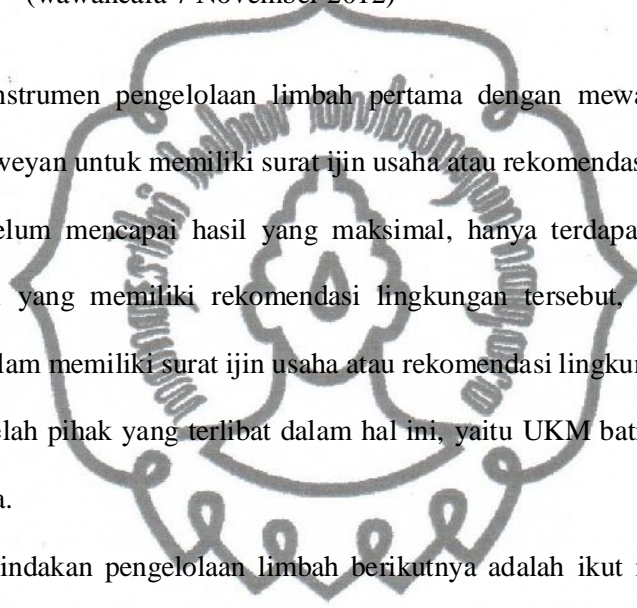
laweyan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU no 32 tahun 2009 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib dilengkapi dengan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Walaupun dalam UU tersebut surat ijin rekomendasi lingkungan bersifat wajib, namun pengusaha batik Laweyan baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, masih banyak yang belum memilikinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si kepala sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup BLH:

“Ijin usaha itu wajib, seperti anda terhadap kepemilikan KTP, kan tidak ada partisipasi, itu wajib anda miliki. Ciri khas industri batik di Solo itu adalah industri batik kecil atau rumah tangga, jadi itu *outsourcing*, tidak ada ijinnya dan tidak punya nama, kalau yang punya nama itu biasanya yang punya ijin, yang di laweyan itu ada puluhan pengusaha, hanya sedikit yang punya nama, sisanya tidak ada namanya. Jadi biasanya yang punya nama itu memproduksi baju atau kainnya kepada yang tidak punya nama” (wawancara 8 November 2012)

Minimnya partisipasi UKM dalam membuat surat kepemilikan ijin usaha atau rekomendasi lingkungan ini juga di sampaikan oleh Bapak Arif Budiman kepala Bidang IT Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan (FPKBL) yang juga merupakan pengusaha batik di sana, beliau mengatakan:

“Setahu saya belum ada peraturan atau belum ada yang menerapkan peraturan ijin usaha seperti itu, karena usaha atau industri batik di Laweyan ini kebanyakan sudah lama dan turun-temurun, bahkan ada

yang sampai generasi ke 7, atau ke 6, jadi kampung batik laweyan itu adalah kampung batik tertua di Indonesia, sebelum adanya peraturan itu, usaha/industri batik di Laweyan sudah ada terlebih dahulu. Hanya saja kan dulu industri batiknya dengan pewarna alam, jadi dahulu memang tidak perlu di kelola limbahnya, ibaratnya pewarna alam diminumpun tidak keracunan, paling cuma pahit, soalnya kan dari dedaunan, tapi kalau sekarang limbahnya diminum ya Wassalam, apalagi naptol itu” (wawancara 7 November 2012)



Instrumen pengelolaan limbah pertama dengan mewajibkan semua UKM batik Laweyan untuk memiliki surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan ternyata masih belum mencapai hasil yang maksimal, hanya terdapat sedikit UKM batik Laweyan yang memiliki rekomendasi lingkungan tersebut, minimnya partisipasi UKM dalam memiliki surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan telah diakui oleh ketiga belah pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu UKM batik, FPKBL, dan BLH Surakarta.

Tindakan pengelolaan limbah berikutnya adalah ikut menghadiri atau aktif dalam setiap pertemuan atau rapat dengan pemerintah sebagai salah satu pihak yang juga bertanggung jawab menangani permasalahan pengelolaan limbah ini. Pemerintah dalam hal ini melalui BLH Surakarta mempunyai tugas untuk selalu melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para UKM batik Laweyan.

Dengan adanya rapat ini diharapkan terjadi komunikasi 2 arah yang efektif untuk dapat memecahkan masalah pengelolaan limbah UKM batik Laweyan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan membutuhkan informasi langsung, cepat, dan akurat dari UKM batik Laweyan yang selanjutnya bisa dijadikan pijakan untuk

commit to user

membuat penyelesaian masalah yang relevan, yang di dukung kedua belah pihak. Oleh karena itu pentingnya partisipasi dari UKM untuk menghadiri dan ikut aktif dalam rapat dengan BLH, agar komunikasi sebagai langkah penanggulangan pencemaran lingkungan dapat berjalan lancar.

Partisipasi UKM batik Laweyan sendiri pada kenyataannya masih tidak seperti yang diharapkan, partisipasi yang terjadi ternyata masih kecil dan tidak merata antara UKM batik yang satu dengan UKM batik yang lain. Masih minimnya intensitas rapat atau forum antara BLH Surakarta dengan para UKM batik Laweyan ini dibenarkan oleh Bapak Arif Budiman kepala Bidang IT FPKBL yang juga merupakan pengusaha batik Laweyan, beliau berkata: “Untuk sementara ini belum ada rapat yang dijadwalkan secara khusus dan rutin, katakanlah pendampingan dari pemerintah kepada UKM untuk saat ini masih belum ada.” (wawancara 7 November 2012).

Demikian pula ditegaskan oleh bapak Arif Wicaksono, pemilik batik ‘Gress Tenan’ di kampung batik laweyan, beliau menjelaskan: “Kalau rapat sama pemerintah itu jarang sekali, paling waktu mau membuat IPAL dulu, sama kalau ada masalah tentang IPAL baru rapat lagi.” (wawancara 23 November 2012).

Pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Bambang Slameto selaku pemilik batik ‘Merak Manis’, beliau mengatakan :

“Kalau rapat sama dinas pemerintahan memang pernah, sama FPKBL juga diundang, macem-macem lah yang datang, itu kalau tidak salah sekitar 6 bulan 1 kali, membahas tentang lingkungan sekitar kampung batik ini secara keseluruhan, kalau punya saya ini sih sudah aman, jadi

tidak pernah ada protes dari warga sekitar.” (wawancara 26 November 2012).

Dari kedua pengusaha yang berada dikampung batik Laweyan tersebut memang mengindikasikan adanya rapat antara UKM Batik dengan BLH Surakarta, namun memang rapat yang pernah ada masih belum terjadwal atau rutin, dan rapat yang diselenggarakan juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan IPAL komunal yang telah dibuatkan oleh BLH dan lembaga lingkungan hidup yang lain, serta rapat tersebut hanya ada di kampung batik Laweyan. Walaupun memang masih sangat jarang dan tidak terstruktur dengan baik, namun rapat antara BLH dengan UKM memang pernah terjadi, hanya saja rapat yang dilakukan diselenggarakan BLH dengan UKM yang ada di kawasan kampung Batik Laweyan.

Berbeda halnya dengan UKM Batik Laweyan yang berada di luar kawasan kampung batik, para pengusaha diluar kampung batik ternyata mendapatkan porsi yang berbeda dalam hal pengadaan rapat atau forum dengan BLH Surakarta. Pengusaha batik diluar kampung batik laweyan, bahkan sama sekali belum pernah diajak rapat oleh BLH Surakarta. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rudi, pemilik batik ‘Mutiara’, bapak Rudi mengatakan: “Kalau saya sih sama sekali belum pernah dapat undangan rapat dengan pemerintah.” (wawancara 27 November 2012)

Tidak adanya rapat atau forum antara pemerintah dengan UKM batik ini kembali di tegaskan oleh bapak Angga pemilik batik ‘Egi’ yang industri batiknya berada di sekitar kampung batik Laweyan, beliau berkata : “Kalau saya sama pengusaha-pengusaha batik disekitar sini tidak pernah diajak rapat sama pemerintah,

dari dulu sampai sekarang sama sekali tidak pernah” (wawancara 24 November 2012)

Rendahnya partisipasi UKM batik dalam menghadiri rapat ini memang menjadi penghambat bagi pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan UKM batik untuk bersama-sama memecahkan masalah ini. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si, beliau menjelaskan :

“Sebenarnya ada rapat dengan UKM Batik Laweyan, tetapi jarang, hanya waktu pembuatan IPAL itu saja, selain itu tidak pernah. Menghadapi pengusaha batik di laweyan itu susah, diajak rapat saja tidak mau. Mungkin karena sudah kebiasaan dari dulu (tidak pernah ada rapat). Barangkali sudah merasa punya uang, sudah kaya, dan juragan, kalau diundang rapat jarang mau, paling kalau yang diundang FPKBL, yang datang hanya pak Alfa (ketua FPKBL), Pak Alfa itu datang karena apa? Ya berharap ada proyek. Tetapi kalau kita sih maunya semua datang bareng, bukan hanya pak Alfa, orang per orang yang memiliki industri batik. Tapi pada tidak mau datang, yang diundang 50, yang datang 5, itupun yang datang penjaganya.” (wawancara 8 November 2012)

Pendapat dari BLH juga menggambarkan bahwa BLH selama ini hanya pernah mengundang UKM batik pada saat akan dibuatkannya IPAL komunal di kampung batik Laweyan, yang berarti bahwa rapat untuk membahas cara pemecahan masalah yang lain belum dilakukan, serta masih minimnya penyelenggaraan rapat yang diadakan oleh BLH kepada UKM batik, terutama UKM batik di luar kawasan kampung batik Laweyan. Tidak meratanya kesempatan untuk menghadiri rapat yang dimiliki UKM batik di Laweyan membuat banyak UKM batik lain yang berada di luar kampung batik sama sekali belum pernah mendapatkan undangan rapat dari

pemerintah, padahal dengan jumlah UKM yang lebih banyak dari kampung batik Laweyan, seharusnya UKM batik di luar kawasan kampung batik patut lebih diperhatikan

Langkah berikutnya dalam upaya pengelolaan limbah UKM batik di Laweyan, yaitu adanya rapat atau forum antara sesama UKM batik Laweyan. Rapat antar UKM batik Laweyan ini penting untuk dilakukan, yang fungsinya untuk pembahasan lingkungan sekitar atau media lingkungan dan masyarakat yang merasakan dampak dari pembuangan limbah industri mereka, serta membahas bagaimana limbah yang dihasilkan oleh UKM batik dapat dikelola dengan baik, secara bersama-sama. Karena pengelolaan limbah UKM batik ini memang pada dasarnya tidak bisa dikerjakan secara individu, untuk itulah perlunya adanya rapat sebagai forum koordinasi antar UKM batik di kecamatan Laweyan Surakarta.

Dalam hal ini, adanya suatu organisasi diperlukan sebagai wadah para UKM batik dalam melakukan kegiatan koordinasi, serta agar semua UKM batik di Laweyan tidak berdiri sendiri sebagai individu, namun dapat menyatu dalam sebuah kelompok yang homogen. Pentingnya organisasi dalam mendorong partisipasi juga dikatakan oleh Goldsmith dan Blustain dalam Taliziduhu Ndraha (1990 : 105), yang berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.

2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya control yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Pendapat Goldsmith dan Blustain diatas memang relevan dengan apa yang terjadi dalam pengelolaan limbah di Laweyan, terutama pada pembahasan ini mengenai pentingnya suatu organisasi, yang di tulis pada poin pertama, bahwa organisasi sebagai faktor yang penting dalam mendorong partisipasi dari para UKM batik Laweyan untuk mengelola limbahnya.

Sampai saat ini organisasi bentukan UKM batik yang ada di Laweyan hanya ada FPKBL (Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan) yang berada di kampung Batik kelurahan Laweyan. Organisasi ini tentunya merupakan suatu organisasi resmi yang memiliki susunan kepengurusan serta visi dan misi organisasi. Salah satu tugas atau agenda kerja yang penting bagi FPKBL adalah pengelolaan limbah yang ada di kampung batik Laweyan. Mengingat bahwa kampung batik merupakan kampung wisata dan bersejarah, yang namanya sudah terkenal hingga ke manca negara, oleh karena itu kebersihan lingkungan harus terus dijaga.

Bapak Arif Budiman kepala Bidang IT (FPKBL) yang juga merupakan pengusaha batik, bercerita tentang peran FPKBL dalam pengelolaan limbah di Laweyan, beliau berkata:

“Peran FPKBL dalam pengelolaan limbah di Laweyan ini ya dengan membuat IPAL komunal, yang merupakan hasil kerjasama dengan lembaga dari Jerman GTZ pro LH, kementerian lingkungan hidup RI, kantor lingkungan hidup Surakarta, dan Bapedal. IPAL komunal ini sendiri merupakan suatu system pengelolaan limbah yang hemat energy dan simpel, karena hanya menggunakan mikroba untuk menetralkan limbah, dan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan limbah, dimana IPAL berada pada daerah paling rendah di kampung batik ini, disebelah selatan, sehingga air limbah industri batik tinggal mengalir saja dari tempat industri menuju IPAL, tanpa menggunakan tenaga diesel, dan sekarang ini hanya ada sekitar 9 atau 10 UKM batik yang tercover dalam IPAL. Selain itu juga terdapat pertemuan antara UKM batik yang menggunakan IPAL ini untuk membahas perawatan IPAL. Apakah ada yang rusak, yang perlu diperbaiki, atau diganti, itu semua dibicarakan dalam rapat itu. Jadi memang rapatnya tidak terjadwal, kalau ada keperluan saja. Bagi pengguna IPAL juga terdapat iuran sebesar 25.000-40.000 rupiah setiap bulannya, itu bervariasi berdasarkan debit limbah yang dikeluarkan.” (wawancara 7 November 2012)

Rapat pengelolaan limbah oleh FPKBL yang hingga saat ini masih tidak terjadwal juga disampaikan oleh Bapak Arif wicaksono, pemilik batik ‘Gress Tenan’, beliau berkata :

“Pernah ada, biasanya rapat membahas IPAL dengan FPKBL juga, ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan rapat RT, kan disini ada 3 RT, jadi setiap bulan ka nada rapat RT, setelah rapat RT selesai, langsung diikuti pembahasan tentang IPAL, yang dipimpin oleh pak Arif FPKBL, yang mengetahui atau mengurus masalah IPAL. Biasanya membahas tentang kerusakan yang ada pada IPAL, atau tentang perawatannya. Selain itu diskusi juga biasanya dilakukan secara informal, misalnya pada saat dilakukan perbaikan pada IPAL di dekat makam, disana juga langsung mengadakan diskusi tentang IPAL.” (wawancara 23 November 2012)

Dari pendapat bapak Arif sebagai pengurus FPKBL dan Bapak Arif Wicaksono sebagai pemilik batik 'Gress Tenan' di kampung batik laweyan, dapat diketahui bahwa rapat yang dilakukan antar UKM batik hanya rapat yang berkaitan dengan IPAL dan lingkungan sekitar kampung batik. Sedangkan dalam kampung batik Laweyan saja, tidak semua UKM menggunakan IPAL, hanya 9 atau 10 UKM dari 26 UKM yang memproduksi batik di kampung batik Laweyan yang menggunakan IPAL. Jumlah UKM yang belum menggunakan IPAL ternyata lebih banyak dari pada yang menggunakan IPAL, ini berarti belum semua UKM batik di kampung batik Laweyan ikut dalam rapat antar UKM batik Laweyan.

Bapak Bambang Slameto sebagai pemilik batik 'Merak Manis' yang berada di kawasan kampung batik merupakan salah satu UKM yang tidak menggunakan IPAL, beliau berkata:

"Tidak ada undangan rapat dari Forum (FPKBL), cuma dulu itu, sudah lama, waktu mau dibuatkan IPAL itu saja, tetapi saya juga tidak tau, berhasil atau tidak IPALnya, soalnya saya tidak menggunakan IPAL. Saya sebenarnya dijadikan penasihat FPKBL, namun saya sudah dibekukan, tapi masih ditulis nama saya." (wawancara 26 November 2012)

FPKBL yang merupakan organisasi UKM batik satu-satunya di kecamatan Laweyan, memang menjadi koordinator bagi semua UKM dalam cakupan kampung batik laweyan saja, sedangkan masih banyak lagi UKM batik di luar kawasan kampung batik di kecamatan Laweyan yang masih belum memiliki wadah organisasi sebagai koordinator aktivitas mereka sebagai kelompok UKM. Tidak adanya organisasi yang mewadahi kelompok UKM diluar kawasan kampung batik ini

membuat aktivitas rapat atau diskusi antar UKM batik untuk membahas masalah limbah juga sangat terhambat, bahkan tidak ada sama sekali.

Tidak adanya rapat atau forum antar UKM batik di luar kampung batik Laweyan juga dikatakan oleh Bapak Angga, pemilik 'Batik Egi', yang letak usahanya berada di luar kawasan kampung batik, beliau berkata:

“Tidak pernah ada rapat antar UKM, disini tidak ada forum seperti di kampung batik, kalau kampung batik kan ada yang mendirikan, sebagai ketua, namanya Pak Alfa, kalau disini tidak ada, jadi ya cuma sendiri-sendiri, ada yang industrinya besar, yang pegawainya diatas 50, ada juga yang industrinya kecil, disini ada semua.” (wawancara 24 November 2012).

Penuturan yang hampir senada juga disampaikan oleh Bapak Rudi, pemilik 'Batik Mutiara', yang usahanya berada di kawasan pajang, Laweyan, beliau berkata:

“Kalau pertemuan dengan sesama pengusaha batik dulu sudah pernah ada, tapi cuma 1 kali, dulu mau dibuat asosiasi pengusaha batik pajang tapi tidak jadi-jadi, kalau pertemuannya dulu membahas tentang akan adanya bantuan dari pemerintah kepada industri batik di pajang.” (wawancara 27 November 2012)

Dari pendapat para pemilik UKM batik di Laweyan yang letaknya tersebar di beberapa kelurahan, dapat diketahui adanya perbedaan kesiapan antara UKM yang berada di kampung batik dengan UKM di luar kampung batik. Payung organisasi kelompok UKM batik di kampung batik FPKBL sediki banyak telah mempengaruhi partisipasi UKM batik dalam mengelola limbahnya. Adanya organisasi ini juga mempermudah kelompok UKM batik dalam berkomunikasi dan koordinasi, baik dengan sesama UKM batik, dengan pemerintah, maupun dengan individu atau kelompok lain diluar mereka. Terlepas dari masih banyaknya kekurangan di tubuh

organisasi FPKBL, seperti yang sudah diakui oleh salah satu pengurus serta anggotanya, FPKBL tetap memiliki peran sebagai organisasi kelompok UKM batik, salah satunya peranya dalam pengelolaan limbah.

Masih banyaknya jumlah UKM batik di kecamatan Laweyan yang belum memiliki wadah organisasi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi ini merupakan penghambat bagi para UKM dalam melakukan salah satu tahap pengelolaan limbah. UKM yang masih berdiri sendiri-sendiri cenderung tidak dapat termonitor kegiatan industrinya oleh pemerintah. Tidak adanya monitor dari pemerintah ini membawa beberapa dampak, tidak terkontrolnya aktivitas produksi UKM batik, sekaligus aktivitas pengelolaan limbahnya, lalu bantuan yang diharapkan UKM batik dari pemerintah untuk dapat mengelola limbah produksi batik juga sulit untuk di dapatkan.

Langkah pengelolaan limbah yang terakhir adalah langkah mengolah air limbah menjadi air yang aman untuk dibuang pada media lingkungan. Langkah mengolah air limbah yang dilakukan UKM batik di Laweyan ini akan selalu membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain agar limbah dapat terkelola dengan baik. Bantuan yang muncul dari pihak luar UKM biasanya muncul karena kepedulian mereka terhadap pencemaran pada lingkungan akibat limbah produksi batik yang tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang lingkungan biasanya menjadi pihak luar yang selalu menjadi penyokong UKM dalam melakukan pengelolaan limbah.

Pentingnya bantuan dari pihak luar ini untuk merubah kebiasaan pengelolaan limbah yang UKM batik lakukan secara sederhana, yang sudah turun-temurun dilakukan, yaitu dengan membuat selokan kecil sebagai saluran limbah, yang mengalir menuju sungai, atau bahkan menggunakan selokan yang sudah ada sebagai tempat membuang air limbahnya secara langsung. Sampai sejauh ini, bantuan yang sudah terlihat muncul dari pihak luar hanya ada di kawasan kampung batik Laweyan, sementara daerah lain di Laweyan masih belum mendapatkan bantuan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Arif Budiman, kepala bidang IT FPKBL, sekaligus pengusaha batik di kampung batik Laweyan, beliau berkata:

“Sebenarnya masih banyak UKM batik di kecamatan Laweyan yang berada di luar kampung batik, seperti di kelurahan Bumi, Sondakan, dan Pajang. Setahu saya yang mendapatkan bantuan IPAL komunal se Indonesia baru di kampung batik Laweyan ini, selain itu, diluar kampung batik setahu saya belum ada pengelolaan limbah, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita (FPKBL). Karena untuk sementara ini mereka belum masuk sebagai anggota FPKBL, sebenarnya sudah kita diskusikan, tetapi ya belum terealisasikan.” (wawancara 7 November 2012)

Sementara itu, dari pihak pemerintah melalui BLH sebenarnya sudah memberikan bantuan pengelolaan limbah kepada UKM batik yang ada di Laweyan, walaupun belum semua dapat dibantu pengelolaan limbahnya oleh BLH, namun bantuan akan selalu diberikan secara bertahap. Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLH Surakarta, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si juga berpendapat adanya bantuan kepada UKM batik Laweyan, beliau berkata:

“Sekarang kalau orang sudah diberi bantuan, kemudian mereka masih meminta, kalau mereka mau menerima bantuan, tapi dengan syarat ini, ini, dan ini. Menurut anda bagaimana partisipasi UKM batik laweyan

kalau seperti itu?. Seperti itulah partisipasi pengusaha-pengusaha batik di Laweyan. Jadi maunya, dibangun IPAL itu dengan biaya pemeliharaan nol, orang saja kalau tidak dipelihara akan mati, apalagi IPAL, yang minta biaya pemeliharaannya nol. Sehingga karena minta biaya pemeliharaannya nol, sehingga pengaliran limbah dari sumber limbah ke IPAL itu menggunakan gravitasi, jadi UKM UKM yang tidak sesuai letak gravitasinya tidak bisa mengalirkan limbahnya ke IPAL. Yang ke 2, karena mereka meminta biaya pemeliharaannya nol, teknologinya seperti *septic tank*, itu kan hanya biologi dengan fisika, dialirkan, dimasukkan di bak pengendapan, kemudian masuk di bak anaerob yang menggunakan mikroba, kemudian keluar nanti lewat saringan semacam pasir, kerikil, dll, itu kan fisika. Tidak ada perlakuan aerasi, tidak ada proses kimianya, kan mintanya nol, makanya nol itu tidak dipelihara. Kemuadia di kelurahan Sondakan Laweyan kita juga akan membangun IPAL komunal juga, hari ini tadi pengurus IPAL dari kelurahan Sondakan sudah datang dan berkoordinasi dengan kami, jadi tinggal pembangunannya saja.” (wawancara 8 November 2012).

Bantuan yang sudah diberikan pemerintah kepada UKM batik ternyata benar-benar dirasakan oleh UKM batik Laweyan, hanya saja memang saat melihat di lapangan kondisi IPAL tidak begitu terawat, terdapat beberapa bak penampungan limbah yang tutupnya rusak, namun air sulingan limbah IPAL memang berbeda dengan air limbah industri batik yang tidak melalui proses IPAL, air tanpa proses IPAL berwarna pekat, dan berbau menyengat, sementara air limbah hasil sulingan IPAL berwarna bening, tetapi belum bening sempurna (Lihat lampiran gambar 1 dan 3). Bapak Arif Wicaksono pemilik batik ‘Gress Tenan’ merupakan salah satu UKM yang mendapat bantuan pengelolaan limbah dari pemerintah, beliau berkata:

“Pengelolaan limbah batik saya dengan bekerjasama dengan industri batik yang lain, yang memproduksi batik sendiri, kan dalam satu kampung batik ini tidak semua memproduksi, ada yang hanya toko saja, dari sekitar 70 *showroom*, yang produksi batik sendiri hanya sedikit, paling 10 UKM. Lalu dipimpin oleh bapak Arif pemilik batik ‘Puspo Kencono’ sekaligus pengurus FPKBL, pak Arif itu kan orang yang

faham, jadi dia yang memberi tau pengusaha-pengusaha yang kurang faham tentang pengelolaan limbah, bagaimana agar limbah itu jadi air netral. Pak Arif itu kan pinter, sekolahnya juga dibidang seperti itu, setiap ada rapat RT, biasanya juga bahas tentang IPAL, dan itu selalu berpindah tempat. Jadi alurnya, apabila IPAL rusak, ketemu pak Alfa dulu, rusaknya apa, lalu minta dana dari pemkot, lalu menyuruh tukang untuk memperbaiki, misalnya filternya kotor atau bocor, ya suruh ganti yang baru. Selain limbah cair, ditempat saya ini juga ada limbah asap dari kegiatan 'mlorot' batik, kan asapnya itu bisa menimbulkan polusi, punya saya didanai juga dari pemkot, kan lama-lama beton asap juga bisa pecah, itu juga digantikan oleh pemerintah, lalu ada penyemprotan insectisida dari pemkot, ke bak-bak batik, dan semuanya itu gratis, pokoknya mulai dari pemerintahan Jokowi sampai dengan Rudi saat ini benar-benar *all out* dalam mengembangkan kampung batik ini." (wawancara 23 November 2012)

Bantuan dari pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah batik sejauh ini memang hanya IPAL yang terlihat jelas dan dirasakan oleh UKM batik di Laweyan, namun mengingat hanya ada 10 UKM batik yang menggunakan IPAL di kecamatan Laweyan, sementara UKM lain yang tidak menggunakan IPAL mempunyai cara yang bervariasi dalam mengelola limbah industrinya. Beragamnya cara mengelola limbah batik para UKM ini tergantung dari sejauh mana pengetahuan, dana, dan kepedulian mereka terhadap lingkungan.

Bapak Bambang Slameto yang merupakan pemilik batik 'Merak Manis' memiliki upaya pengelolaan limbah batik pribadi, walaupun letak usahanya berada di kawasan kampung batik, beliau berkata:

"Saya itu memproduksi semua jenis batik, baik cap, tulis, printing, lalu saya mengelola limbahnya sendiri dibelakang, secara pribadi, kira-kira 10 meter lah ukuran bak nya, jadi saya tidak ikut IPAL, yang ikut IPAL itu UKM lainnya, kurang lebih 10 UKM. Punya saya ini dulu dibuatkan oleh sebuah instansi dari Bandung, namanya saya lupa, kalau petugas yang membutuhkan yang kesini dulu namanya Ibu Erna Witular. Pembuatannya

dulu gratis biayanya, bahkan Ibu Erna menginap di hotel saja bayar sendiri, jadi saya sama sekali tidak kehilangan biaya apa-apa, itu dibangun tahun 1996, kalau industri saya ini sudah berdiri tahun 1980, saya sendiri yang mendirikan. Kalau system pengelolaannya hampir sama seperti IPAL, ada 4 bak penampungan, ada filternya juga di dalam, tidak boleh dibuka, kalau perawatanya ada ahli yang datang lalu memeriksa/mengontrol, setiap 6 bulan, ini juga gratis, BLH juga ikut mengawasi pengelolaan limbah ini terus. Di Laweyan cuma saya yang dibuatkan seperti ini.” (wawancara 26 November 2012)

Bentuk pengelolaan limbah yang dilakukan oleh bapak Bambang juga merupakan bantuan dari pihak luar yang di dapatkannya dengan tanpa mengeluarkan biaya. Ketergantungan UKM batik yang masih sangat kuat kepada pihak luar membuat UKM hanya akan melakukan pengelolaan limbah apabila ada bantuan dari luar atau apabila ada tekanan dari pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan kesadaran dari UKM untuk mengelola limbahnya masih sulit untuk ditemukan. Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLH Surakarta, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si juga mengakui kesadaran dan partisipasi UKM batik Laweyan dalam mengelola limbah masih belum optimal.

“Sekarang saya bertanya kepada anda, kalau penduduk Surakarta ini ditanya, boleh tidak membuang sampah di sungai atau selokan?, semua pasti menjawab tidak boleh atau tidak bagus, tetapi kenyataannya kan semua masih buang sampah di sungai. Itu karena tidak ada kesadaran dan kurangnya pegakan hukum, orang yang buang sampah di sungai tidak pernah dihukum. Karena begini, orang itu hukum alamnya selalu mencari keuntungan, kalau saya bisa buang disini, ngapain saya buang ke TPS?, kan tidak di apa-apain, yang lainnya bisa seperti itu, kenapa saya tidak?.” (wawancara 8 November 2012)

Dari pernyataan Bapak Sultan Najamuddin tersebut, beliau menganalogikan perilaku UKM yang membuang limbah dengan perilaku masyarakat yang membuang

commit to user

sampah sembarangan. Beliau menekankan bahwa perilaku UKM dalam mengelola limbah industri batik yang masih minim, dengan bertolak pada sifat dasar manusia yang selalu mencari keuntungan, apabila tidak ada perbedaan antara mengelola limbah atau tidak mengelola limbah para UKM cenderung memilih untuk tidak mengelola limbahnya sebelum dibuang di sungai. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang masih kurang dari UKM batik Laweyan, serta belum adanya sebuah hukuman atau sanksi atau tuntutan kepada UKM batik yang tidak mengelola limbahnya menjadikan pengelolaan limbah tidak begitu penting bagi UKM batik Laweyan.

Pada kenyataannya memang seperti apa yang dikatakan oleh bapak Sultan Najamuddin, bahwa banyak sekali UKM batik Laweyan, terutama yang berada di luar kawasan kampung batik yang tidak mengelola limbahnya sebelum dibuang di media lingkungan. Bapak Angga pemilik 'Batik Egi' mengakui tidak adanya pengelolaan limbah yang dilakukan olehnya dan UKM batik lain di sekitarnya.

“Kalau limbah itu sebenarnya ada yang dikelola atau disaring dulu, jadi air putih, baru dibuang ke sungai, tapi kalau pabrik kecil ya langsung saja dibuang di selokan-selokan kecil dekat industri, kalau punya saya ini ya limbahnya langsung saya buang saja ke selokan. Biasanya masyarakat itu menolak adanya limbah dari industri batik, tapi karena memang sudah lama industri batik ada disini, jadi sudah pada paham lah masyarakat disini, selain itu semua di kampung ini kan rata-rata industri batik semua, jadi sudah sama-sama mengerti. Kalau disini semuanya sama, tidak ada yang dikelola limbahnya, langsung dibuang ke selokan atau ke sungai.”
(wawancara 24 November 2012)

Tidak adanya pengelolaan limbah pada wilayah diluar kampung batik laweyan ini sebenarnya membuat pengelolaan limbah yang dilakukan di kampung

batik nampak sia-sia. Karena pada dasarnya hampir semua UKM di Laweyan membuang limbahnya di kali Jenes, atau di selokan kecil yang bermuara di kali jenes juga. Maka walaupun air sulingan IPAL dari kampung batik sudah berwarna cukup jernih, namun warna air sungai Jenes tetap pekat.

Bapak Rudi pemilik 'Batik Mutiara' juga mengakui bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan UKM batik di daerahnya, di kelurahan Pajang Laweyan sangat minim. Rata-rata UKM batik di luar kampung batik memang sama minimnya dalam mengelola limbah, mereka biasanya hanya membuangnya di selokan yang sudah ada, atau membuat selokan sendiri untuk air limbahnya menuju ke sungai Jenes, tanpa melalui proses penetralan air limbah terlebih dahulu. Bapak Rudi menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

"Kalau limbah dari industri batik saya ini hanya saya buang langsung di selokan, tapi itu selokan khusus untuk limbah batik saya. Jadi dulu itu waktu awal-awal mendirikan industri batik ini, saya membuat selokan dari rumah saya yang buat pabrik itu sampai sungai jenes, dengan sepenuhnya biaya pribadi saya. Limbahnya dari pabrik ke limbah langsung saya buang, tanpa ada pengelolaan terlebih dahulu. Kalau dulu waktu belum saya buat selokan khusus dari rumah ke sungai itu memang di protes warga, karna sumur warga kotor, tapi setelah saya buat selokan itu, sudah tidak ada protes lagi dari warga, sekitar tahun 1998 saya membuat selokan limbah itu." (wawancara 27 November 2012)

Partisipasi UKM batik Laweya dalam mengelola limbahnya secara maksimal ini memang masih dikatakan minim. Persebaran bantuan dari pihak lain yang tidak merata membuat pengelolaan limbah juga tidak merata, antara daerah satu dengan daerah lain di laweyan memiliki tingkat partisipasi yang berbeda. Hanya saja para UKM memilik kesamaan akan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar,

terutama pihak pemerintah dalam mengelola limbahnya, ini yang merupakan salah satu penghambat berkembangnya partisipasi mereka dalam mengelola limbah produksinya sendiri.

Terhambatnya partisipasi UKM batik dalam mengelola limbah sesuai apa yang dikemukakan oleh Lockman Soetrisno (1995,233), bahwa paternalism sebagai penghambat partisipasi. Mungkin merupakan suatu gejala universal bahwa setiap elite politik suatu negara berusaha menempatkan diri sebagai seorang bapak terhadap rakyat yang mereka pimpin. Sebagai bapak, ia merasa wajib terus membantu semua masalah yang dihadapi oleh rakyat atau anggota organisasinya. Disamping itu, ia harus menyetujui segala sesuatu yang dikerjakan oleh anggota keluarganya.

Hal itu tampak sangat ideal, namun tanpa kita sadari, apabila kebudayaan seperti itu dikaitkan dengan proses pembangunan suatu masyarakat, maka akan menjadi kendala dalam membangkitkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam situasi seperti ini, akan tercipta apa yang disebut *sense of inadequacy* atau rasa ketidak mampuan yang laten di kalangan masyarakat, yang akhirnya bermuara pada perasaan ketergantungan yang tinggi pada bantuan si bapak untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Setiap saat masyarakat menghadapi suatu masalah, maka yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana pendapat atau petunjuk bapak, bukan bagaimana mereka memecahkan masalah tersebut. Tanpa petunjuk bapak mereka, masyarakat tidak akan berani mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah mereka sendiri.

Perilaku seperti inilah yang melekat pada diri UKM batik yang ada di Laweyan, ketergantungan dengan pemerintah maupun pihak lain yang peduli terhadap mereka sangat tinggi. Bisa dilihat, adanya IPAL komunal di kampung batik, cerobong asap, IPAL pribadi milik bapak Bambang Slameto, semua itu merupakan hasil dari bantuan pihak luar. Sedangkan UKM sendiri hanya diberi tugas untuk merawat apa yang telah diberikan pemerintah serta pihak luar lainnya. Sampai saat ini masih belum terdapat UKM di Laweyan yang melakukan pengelolaan limbah secara pribadi, dengan biaya pribadi, tanpa bantuan dari pihak luar.

Masyarakat sekitar tempat industri batik sebenarnya merupakan orang yang merasakan langung dari dampak negatif dari limbah batik yang tidak dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan di sekitar mereka tentu saja dapat berdampak pada kenyamanan mereka tinggal di tempat tersebut, serta kesehatan yang kadang kala terganggu akibat adanya pencemaran. Mereka merupakan pihak yang seharusnya dapat memberikan protes, kritik, tuntutan, atau desakan kepada UKM batik agar limbahnya dapat dikelola dengan baik, sehingga UKM merasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola limbahnya menjadi air limbah yang aman untuk dibuang ke media lingkungan.

Ibu Yuanita merupakan daerah yang tinggal disekitar lingkungan industri batik diluar kawasan kampung batik, beliau berkata :

“Kalau pengusaha-pengusaha batik disini limbahnya sama sekali tidak ada yang dikelola, jadi limbahnya itu langsung dibuang di sungai, kalau tidak ya di selokan-selokan kecil ini. Di dekat rumah saya ini ka nada sungai yang kira-kira lebarnya hanya 2 sampai 3 meter, di sungai itu biasanya semua pengusaha batik mencuci batiknya untuk menghilangkan

pewarnanya, kalau sudah dicuci di sungai, baru kain batiknya dibawa ke pabrik untuk di cuci lagi, air dari pabrik itu dibuang di selokan. Jadi mereka itu pintar, untuk mencuci batiknya tidak memerlukan banyak air, soalnya kan uda dicuci di sungai itu. Yang saya rasakan itu pasti bau menyengat dari air limbah cucian kain itu, baunya kan tidak enak. Padahal kan sungai yang buat mencuci batik itu dekat sama SD dan rumah-rumah penduduk. Ditambah lagi di sungai itu juga dipakai buat WC umum, dan tempat memandikan kerbau, jadi makin tambah kumuh (Lihat lampiran gambar 5). Air di sungai itu selalu kotor, dan berubah-ubah warnanya, kalau pas banjir air yang kotor itu bisa luber sampai ke jalan. Warga sekitar juga sering terkena penyakit, seperti demam berdarah, dan lain-lain.” (wawancara 28 November 2012)

Situasi berbeda dialami oleh masyarakat di kampung batik Laweyan, dengan adanya IPAL di kampung batik, tentu saja ada perbedaan dari segi dampak langsung terhadap masyarakat, karena IPAL tersebut sangat rapi, saluran limbahnya mulai dari tempat asal limbah, dialirkan sampai IPAL di pinggir sungai, semuanya tertutup rapat, jadi bau menyengat dari air limbah batik tidak begitu terasa. Selain itu lokasi IPAL yang tidak berdekatan dengan rumah penduduk juga membuat bau air limbah di bak penampungan IPAL tidak sampai ke perumahan penduduk. Memang kampung batik yang merupakan tempat wisata sudah sangat teratur pengelolaan limbahnya.

Ibu Debby Indah yang merupakan warga asli kampung batik Laweyan juga menyatakan demikian, beliau berpendapat :

”Setahu saya, pengelolaan limbah yang dilakukan UKM batik di sini ya Cuma pakai IPAL itu, IPAL itu ada di pinggir kali Jenes, dekat kuburan, IPAL itu dipakai bareng-bareng sama pengusaha-pengusaha batik di kampung batik ini. Selain itu saya kurang tau, soalnya saya saja tidak pernah melihat proses produksinya secara langsung. Yang saya rasakan dampak dari limbah industri sebenarnya hanya kadang masih terasa bau limbahnya, bau limbah bercampur sampai dari sungai Jenes itu, kan

dipinggir sungai Jenes itu juga ada banyak sekali tumpukan sampah. Kadang kalau hujan deras, sampai banjir di sekitar kuburan. Kalau sekarang ini kan saluran air limbahnya semua sudah tertutup, jadi ya sudah tidak ada bau nya.” (wawancara 21 November 2012)

Walaupun memang dampak dari limbah UKM batik yang tidak dikelola itu secara umum tetap merugikan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, namun protes yang diberikan masyarakatpun tidak banyak, paling hanya sebatas protes yang berkaitan dengan bau tidak sedap, yang berasal dari air limbah batik tersebut. Maka memang sebagian besar pengusaha hanya mengelola limbah dengan menutup selokan pengaliran limbah dengan rapat, agar tidak menimbulkan bau menyengat. Selain itu, masyarakat sekitar UKM batik pada umumnya tidak menuntut lagi kepada UKM untuk mengelola limbahnya.

Protes atau tuntutan masyarakat kepada UKM ini sebenarnya dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi para UKM batik Laweyan untuk melakukan pengelolaan limbah, tetapi berhubung tuntutan dari masyarakat sendiri tidak banyak, maka UKM pun hanya melakukan apa yang dituntut oleh masyarakat. Minimnya tuntutan masyarakat kepada UKM ini dipengaruhi oleh perhatian-perhatian yang diberikan UKM batik Laweyan kepada masyarakat sekitar. Salah satu wujud perhatian UKM yang umumnya dilakukan oleh semua UKM batik Laweyan adalah dengan mempekerjakan masyarakat sekitar UKM batik. Memang tidak semua pekerja di UKM tersebut merupakan warga sekitar, hanya saja warga yang menganggur, atau warga yang mau untuk jadi pekerja di UKM tersebut, pasti akan diterima.

Ibu Debby Indah yang merupakan masyarakat sekitar UKM batik Laweyan juga mengakui adanya perhatian dari UKM kepada masyarakat, beliau berkata :

“Pengusaha di kampung batik ini biasanya mengambil karyawan warga sekitar sini juga, jadi itu mungkin bisa dikatakan perhatian yang diberikan mereka, kadang-kadang juga sama-sama melakukan kerja bakti di lingkungan kampung batik, ya seperti itulah perhatian pengusaha batik kepada masyarakat sekitar.” (wawancara 21 November 2012)

Ibu Yuanita juga memberikan penekanan yang serupa terkait dengan perhatian UKM terhadap masyarakat sekitar,

“Menurut saya tidak ada perhatian khusus yang diberikan pengusaha batik terhadap warga sekitar, mereka bebas-bebas saja melakukan proses produksi disini, termasuk menggunakan lapangan umum sebagai tempat menjemur kain, paling perhatiannya dengan mempekerjakan warga sekitar sini.” (wawancara 28 November 2012)

Para pengusaha batik pun mengatakan hal yang hampir sama mengenai perhatian yang mereka berikan kepada masyarakat sekitar, sebagai wujud tanggung jawab sosial mereka. Bapak Rudi pemilik ‘Batik Mutiara’ berkata:

”Perhatian yang saya berikan kepada masyarakat itu ya dengan membuatkan selokan limbah, agar masyarakat tidak terganggu dengan bau dari limbah batik saya, lalu mempekerjakan penduduk sekitar, pegawai saya kan rata-rata penduduk sekitar industri, selain ada juga yang dari waru sama baki. Lalu kalau waktu lebaran biasanya memberi orang yang ada di sekitar pabrik.” (wawancara 27 November 2012)

Lalu ada pula Bapak Arif Wicaksono pemilik batik ‘Gress Tenan’ yang mengutarakan pendapat yang hampir sama dengan bapak Rudi,

“Perhatian yang saya berikan ya paling mempekerjakan warga sekitar sini sebagai pegawai saya. Pegawai saya itu rata-rata turun temurun, jadi dari orang tuanya dulu pegawai saya, lalu kalau anaknya mau, bisa kerja juga

di tempat saya, seperti itu uteras sejak dulu. Kalau selain itu tidak ada, soalnya warga juga tidak ada yang terganggu atau *complain* masalah limbah batik saya, kan sudah tidak mengganggu dan tidak bau, IPALnya juga sudah rapi, dari sini sampai kuburan di dekat kali Jenes itu.” (wawancara 23 November 2012)

Selain karena perhatian yang diberikan UKM batik terhadap masyarakat sekitar industri, ternyata ada faktor lain yang membuat tuntutan atau protes masyarakat kepada UKM batik menjadi minim terkait dengan pengelolaan limbahnya. Karena biasanya dalam satu lingkungan itu terdapat banyak UKM yang berada di daerah yang sama. Pada kecamatan Laweyan sendiri sebenarnya terdapat 11 kelurahan, namun yang merupakan daerah produksi batik hanya terdapat pada kelurahan Laweyan, Pajang, Sondakan, dan kelurahan Bumi. Dari 4 kelurahan yang menjadi sentra produksi batik, letak UKM batik biasanya berdekatan dalam satu sentra produksi, sehingga terdapat rasa saling memaklumi dan mengerti satu sama lain, antar pengusaha batik. Masyarakat yang tidak menjadi pengusaha batikpun suaranya menjadi suara minoritas, karena adapula masyarakat yang menjadi karyawan dari pengusaha batik disekitarnya, dan membuat mereka hanya bisa menerima dan memaklumi tinggal di kawasan lingkungan pengusaha batik.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Angga, pemilik ‘Batik Egi’, beliau berpendapat:

“Kalau masyarakat disini kan sudah menerima, karena memang sudah lama industri batik disini, jadi sudah pada faham lah, selain itu semua di kampung ini kan industri batik semua rata-rata, jadi semua sudah sama-sama mengerti.” (wawancara 24 November 2012)

Dari pemaparan para informan diatas, dapat dilihat bahwa memang terdapat berbagai macam cara keterlibatan para UKM batik Laweyan dalam mengelola limbah industrinya. Selain itu, dari 4 kelurahan di Laweyan yang merupakan daerah produsen batik, yaitu kelurahan pajang, bumi, sondakan, dan laweyan, ternyata UKM batik di kelurahan Laweyan memiliki cara keterlibatan yang lebih baik dalam mengelola limbah industrinya.

Margono Slamet dalam Suminah dkk (2002: 86), berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud apabila terpenuhinya 3 faktor yang mendukung, yaitu:

1. Kemauan

Kemauan adalah aspek emosi dan perasaan terhadap suatu obyek tertentu yang berupa kecenderungan reaksi psikis yang timbul dari dalam diri manusia yang dapat menimbulkan motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan obyek tertentu.

2. Kemampuan

Kesanggupan seseorang untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan karena memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.

3. Kesempatan

Peluang yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Partisipasi UKM batik Laweyan dalam mengelola limbah sampai saat ini memang dapat dikatakan belum terwujud dengan baik, melihat dari bagaimana cara

keterlibatan UKM batik dalam setiap proses atau tahapan pengelolaan limbah. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Margono Slamet, bahwa minimnya partisipasi UKM batik Laweyan dalam mengelola limbah itu dikarenakan kurangnya 3 faktor pendukung yang disebutkan diatas, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan.

Kemauan disini dalam artian bahwa dorongan dari diri pengusaha sendiri untuk melakukan pengelolaan limbah, yang selanjutnya akan dapat menjadikan semangat bagi pengusaha tersebut untuk melakukan pengelolaan limbah. Dalam faktanya kemauan UKM batik untuk mengelola limbahnya masih rendah, ini bisa dilihat dengan tidak adanya upaya mereka untuk melakukan tahap-tahap pengelolaan limbah, dari membuat rekomendasi usaha yang merupakan filter pertama untuk mencegah adanya pencemaran, lalu minimnya kemauang menghadiri rapat-rapat atau forum, baik dengan sesama UKM batik, maupun dengan BLH. Serta belum muncul kemauan untuk berupaya mengelola limbahnya sendiri dengan biaya pribadi, UKM batik hanya menunggu bantuan atau perhatian yang diberikan dari pihak lain agar permasalahan pengelolaan limbahnya dapat teratasi.

Selanjutnya minimnya kemampuan UKM batik dalam hal pengelolaan limbah yang dapat menghambat proses partisipasi mereka. Memang dibutuhkan pengetahuan khusus untuk dapat mengelola limbah, pengetahuan akan pentingnya memiliki rekomendasi lingkungan, pengetahuan pentingnya berkoordinasi dengan pemerintah dan UKM batik lain agar masalah pengelolaan limbah dapat diatasi bersama-sama, serta pentingnya pengetahuan mulai dari mana dan bagaimana

limbah batik itu dikelola. Pengetahuan bisa di dapatkan baik dari pendidikan formal, diskusi, maupun dari penyuluhan atau sosialisasi pemerintah.

Lalu faktor pendukung lain yang masih belum dimiliki sebagian besar UKM batik Laweyan adalah kesempatan. Kesempatan dalam pengelolaan limbah ini dapat diberikan oleh pemerintah maupun pihak lain yang peduli dengan pencemaran lingkungan yang ada di Laweyan. Hanya saja kesempatan yang ada hingga sekarang belum merata kepada semua UKM batik yang ada di Laweyan, kesempatan ini lebih banyak dimiliki oleh UKM batik yang ada di kampung batik. UKM di kampung batik memang terlihat mendapatkan perhatian yang lebih dari BLH, beberapa kegiatan dan bantuan masih sering diberikan kepada UKM yang ada di kampung batik, inilah sebabnya kesempatan bagi UKM batik Laweyan tidak merata, dan hanya di dapatkan oleh sebagian kecil UKM saja.

2. Intensitas Dan Frekuensi Kegiatan

Dalam intensitas dan frekuensi kegiatan disini merupakan seberapa sering, seberapa rutin, serta berapakah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dilakukan oleh UKM batik Laweyan sebagai bentuk partisipasi mereka dalam pengelolaan limbah industrinya. Intensitas dan frekuensi kegiatan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yang pertama Partisipasi intensif, terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas kegiatan partisipasi yang tinggi. Yang kedua partisipasi ekstensif, ini terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak

teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi UKM batik laweyan dalam mengelola limbah, dapat dilihat juga dengan bagaimana intensitas dan frekuensi kegiatan pengelolaan limbah yang mereka lakukan. Intensitas dan frekuensi kegiatan dalam pengelolaan limbah batik ini lebih mengarah terhadap tingkat pertemuan atau rapat atau diskusi yang mereka lakukan, baik antar UKM batik, maupun antara UKM batik dengan pemerintah kota Surakarta melalui BLH Surakarta.

Dari beberapa cara keterlibatan UKM batik Laweyan dalam mengelola limbah, mulai dari kepemilikan surat rekomendasi lingkungan atau surat ijin usaha, lalu menghadiri rapat antara UKM batik dengan pemerintah, serta menghadiri rapat antar UKM batik, dan yang terakhir bagaimana UKM batik mengelola air limbahnya secara langsung, yang dapat dilihat bagaimana intensitas dan frekuensi kegiatannya adalah kegiatan menghadiri forum atau rapat yang dilakukan antar UKM batik Laweyan, maupun antara UKM batik Laweyan, dengan pemerintah.

Menghadiri sebuah forum atau rapat mengenai pengelolaan limbah memang penting bagi UKM batik Laweyan. Forum pertama yang bisa dihadiri yaitu forum antara UKM batik Laweyan dengan pemerintah kota Solo melalui BLH Surakarta. Forum yang dilakukan antara UKM dengan BLH ini memang sebenarnya ada dalam agenda BLH Surakarta, kaitannya dalam mengkoordinasi

UKM batik dalam pengelolaan limbah, serta mencari pemecahan masalah yang relevan bersama-sama UKM batik Laweyan.

Forum antara BLH dengan UKM batik Laweyan itu memang sudah pernah dilakukan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah UKM batik Laweyan, hanya saja intensitas dan frekuensi kegiatan rapat atau forum antara BLH Surakarta dengan UKM batik ini sampai saat ini belum terdapat jadwal yang rutin, atau terjadwal, semua kegiatan rapat atau diskusi ini diselenggarakan hanya sesuai kebutuhan saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Arif Budiman, sebagai pengusaha batik dan kepala bidang IT di FPKBL, yang mengatakan:

“Sementara ini belum ada yang dijadwalkan secara khusus rapat antara UKM Batik dengan BLH, belum ada katakanlah pendampingan dari pemerintah, untuk saat ini masih belum ada.” (wawancara 7 November 2012)

Dalam rapat yang sudah pernah dilakukan dan dihadiri oleh UKM Batik dengan BLH Surakarta juga bukan dalam rangka membuat atau mencari suatu pemecahan permasalahan yang baru, akan tetapi hanya mengkoordinasi atau menyelaraskan implementasi program atau kebijakan yang sudah ada. Program atau kebijakan yang siap untuk di implementasikan sebagai salah satu solusi penanggulangan masalah pengelolaan limbah yaitu program pembuatan IPAL.

Seperti diketahui dari hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya, bahwa IPAL hanya terdapat pada kampung batik Laweya, sehingga UKM batik yang pernah di undang rapat atau diskusi dengan BLH Surakarta hanyalah UKM

Batik yang ada di kampung batik saja. Salah satu pengusaha batik yang pernah mendapatkan undangan rapat dengan BLH Surakarta adalah Bapak Bambang Slameto, pemilik batik 'Merak Manis', beliau berkata:

“Kalau rapat sama dinas itu pernah, FPKBL juga diundang, macem-macam lah, itu kurang lebih sekita 6 bulan 1 kali, membahas tentang lingkungan kampung batik secara keseluruhan, kalau punya saya sih sudah aman, tidak ada protes dari warga.” (wawancara 26 November 2012)

Sedangkan UKM batik Laweyan yang lain di luar kampung batik tidak pernah mendapatkan undangan atau ajakan rapat dari BLH Surakarta untuk membahas masalah pengelolaan limbah mereka. Sehingga sama sekali tidak ada intensitas dan frekuensi kegiatan rapat antara BLH Surakarta dengan UKM Batik yang berada diluar kampung batik Laweyan. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Rudi, pemilik 'Batik Mutiara' yang ada di kelurahan Pajang, “Kalau saya sih selama ini belum pernah ada undangan diskusi dengan pemerintah.” (wawancara 27 November 2012). Tidak adanya ajakan rapat dengan BLH juga dikatakan oleh bapak Angga pemilik batik 'Egi' yang industri batiknya berada di sekitar kampung batik Laweyan, beliau berkata : “Kalau saya sama pengusaha-pengusaha batik disekitar sini tidak pernah diajak rapat sama pemerintah, dari dulu sampai sekarang sama sekali tidak pernah” (wawancara 24 November 2012).

Pertemuan selain pembahasan terkait IPAL nampaknya masih belum pernah di selenggarakan oleh BLH Surakarta dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan limbah UKM batik di Laweyan. Intensitas dan frekuensi rapat yang masih jarang memang menjadi penghambat pengelolaan limbah UKM batik

Laweyan. Minimnya intensitas rapat ini juga diungkapkan oleh bapak Sultan Nadjamuddin dari BLH Surakarta,

“Sebenarnya ada rapat dengan UKM Batik Laweyan, tetapi jarang, hanya waktu pembuatan IPAL itu saja, selain itu tidak pernah. Menghadapi pengusaha batik di laweyan itu susah, diajak rapat saja tidak mau. Mungkin karena sudah kebiasaan dari dulu (tidak pernah ada rapat). Barangkali sudah merasa punya uang, sudah kaya, dan juragan, kalau diundang rapat jarang mau, paling kalau yang diundang FPKBL, yang datang hanya pak Alfa (ketua FPKBL), Pak Alfa itu datang karena apa? Ya berharap ada proyek. Tetapi kalau kita sih maunya semua datang bareng, bukan hanya pak Alfa, orang per orang yang memiliki industri batik. Tapi pada tidak mau datang, yang diundang 50, yang datang 5, itupun yang datang penjaganya.” (wawancara 8 November 2012)

Pendapat bapak Sultan Nadjamuddin menggambarkan bagaimana rendahnya partisipasi UKM Batik Laweyan dalam menghadiri rapat dengan BLH Surakarta, BLH Surakarta sudah berupaya mengumpulkan UKM Batik yang ada di Laweyan, namun pada kenyataannya memang sulit untuk mempertemukan seluruh UKM batik Laweyan dengan BLH Surakarta dalam satu forum.

Secara garis besar sebenarnya dapat dikatakan bahwa intensitas dan frekuensi kegiatan rapat antara BLH Surakarta dengan UKM Batik Laweyan secara keseluruhan merupakan partisipasi ekstensif, ini karena pertemuan-pertemuan antara UKM batik dengan BLH Surakarta diselenggarakan secara tidak teratur, bahkan sebagian besar UKM Batik di Laweyan tidak pernah mendapatkan undangan rapat dari BLH Surakarta.

Bentuk partisipasi UKM batik dalam mengelola limbah yang lain dan dapat diukur frekuensi dan intensitas kegiatannya adalah menghadiri atau

melakukan rapat antar UKM Batik Laweyan. Rapat antar UKM batik ini sendiri merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar kelompok UKM batik dapat memecahkan permasalahan pengelolaan limbah ini secara bersama.

Adanya rapat antar UKM Batik ini biasanya dapat terselenggara karena di prakarsai oleh suatu organisasi yang ada di dalam kelompok UKM batik di Laweyan tersebut. Dalam hal ini di Laweyan hanya ada FPKBL sebagai satu-satunya organisasi yang berisikan UKM batik, namun khusus UKM batik yang ada di kampung batik. Oleh karena itu di kampung batik sudah pasti terdapat rapat antar UKM batik yang membahas tentang pengelolaan limbah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wicaksono, pemilik batik 'Gress Tenan' di kampung batik, beliau berkata:

“Pernah ada, biasanya rapat membahas IPAL dengan FPKBL juga, ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan rapat RT, kan disini ada 3 RT, jadi setiap bulan ka nada rapat RT, setelah rapat RT selesai, langsung diikuti pembahasan tentang IPAL, yang dipimpin oleh pak Arif FPKBL, yang mengetahui atau mengurus masalah IPAL. Biasanya membahas tentang kerusakan yang ada pada IPAL, atau tentang perawatannya. Selain itu diskusi juga biasanya dilakukan secara informal, misalnya pada saat dilakukan perbaikan pada IPAL di dekat makam, disana juga langsung mengadakan diskusi tentang IPAL.” (wawancara 23 November 2012)

Dari pendapat bapak Arif Wicaksono tersebut dapat diketahui bahwa jadwal rapat antar UKM Batik di kampung batik ternyata memang belum ada jadwal tersendiri, yang rutin dan pasti, jadwal rapat hanya mengikuti jadwal arisan RT, dan dilakukan dengan forum yang lebih mengarah ke non formal, karena bentuknya

hanya ‘Jagongan’ setelah selesai rapat. Rapat tersebut cenderung selalu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan IPAL, sehingga apabila tidak ada masalah pada IPAL, tidak akan dilakukan rapat antar UKM batik Laweyan.

Namun kembali lagi rapat ini sebenarnya masih belum cukup untuk mewakili UKM yang ada di kampung batik, apalagi mewakili UKM batik yang ada di Laweyan, masih sangat jauh jumlahnya. Karena pengguna IPAL hanya 9 UKM batik, dan jumlah UKM batik yang produksi di Laweyan terdapat 26 UKM, sedangkan jumlah total UKM Batik di Laweyan ada sekitar 200 UKM menurut BLH, karena memang belum diketahui jumlah pastinya.

Bagi UKM batik yang tidak menggunakan IPAL, tentu saja intensitas dan frekuensi rapat antar UKM akan lebih jarang bahkan tidak pernah. Bapak Bambang sebagai pemilik batik ‘Merak Manis’ yang tidak menggunakan IPAL komunal, meski lokasi usahanya ada di kampung batik, beliau berkata:

“Tidak ada undangan rapat dari Forum (FPKBL), cuma dulu itu, sudah lama, waktu mau dibuatkan IPAL itu saja, tetapi saya juga tidak tau, berhasil atau tidak IPALnya, soalnya saya tidak menggunakan IPAL. Saya sebenarnya dijadikan penasihat FPKBL, namun saya sudah dibekukan, tapi masih ditulis nama saya.” (wawancara 26 November 2012)

Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan bapak angga sebagai pemilik ‘Batik Egi’, yang lokasi usahanya diluar kawasan kampung batik, beliau bahkan belum pernah mendapat ajakan rapat dari pihak manapun:

“Tidak pernah ada rapat antar UKM, disini tidak ada forum seperti di kampung batik, kalau kampung batik kan ada yang mendirikan, sebagai ketua, namanya Pak Alfa, kalau disini tidak ada, jadi ya cuma sendiri-sendiri, ada yang industrinya besar, yang pegawainya diatas 50, ada juga

yang industrinya kecil, disini ada semua.” (wawancara 24 November 2012).

Dilihat dari intensitas dan frekuensi kegiatan rapat antar UKM batik Laweyan ini juga merupakan bentuk partisipasi ekstensif, sama seperti partisipasi UKM batik dalam melakukan atau menghadiri rapat dengan BLH. Dalam kegiatan rapat antar UKM batik ini jarang diselenggarakan, serta diadakan secara tidak teratur atau tidak terjadwal dengan rutin. Adanya organisasi kelompok yang diharapkan bisa mengkoordinir dan menggerakkan UKM batik untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan limbah ternyata tidak banyak membantu, karena hanya ada 1 buah organisasi, yaitu FPKBL yang hanya memayungi UKM batik di kampung batik Laweyan, sedangkan di daerah yang lain sama sekali belum terdapat organisasi serupa, sehingga tidak terdapat pula rapat antar UKM batik yang dapat dijadikan salah satu langkah partisipasi dalam mengelola limbah industri batik UKM di Laweyan.

3. Hambatan Pengelolaan Limbah UKM Batik Laweyan

Hambatan dalam pengelolaan limbah UKM batik Laweyan ini dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu dari pandangan UKM Batik Laweyan, FPKBL, dan dari pemerintah. Masing-masing pihak tersebut mempunyai hambatan yang berbeda-beda dalam upaya pengelolaan limbah UKM Batik Laweyan, dan juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengelola limbah

industri batik, sehingga dapat dibuang dengan aman pada media lingkungan serta tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan.

Hambatan yang dialami oleh masing-masing pihak dalam upaya pengelolaan limbah UKM batik Laweyan ini tentu saja membutuhkan pemecahan masalah yang berbeda-beda pula, agar setiap pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan limbah ini dapat berpartisipasi atau berkontribusi secara maksimal. Semua pihak baik UKM Batik, FPKBL, dan BLH Surakarta, dituntut untuk dapat bekerjasama secara baik, dan masing-masing harus mempunyai kontribusi yang maksimal, karena pemecahan masalah pengelolaan limbah ini tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan usaha beberapa pihak saja.

UKM Batik Laweyan sebagai pelaku utama yang melakukan kegiatan produksi batik dan menghasilkan limbah industri merupakan pangkal dari permasalahan ini. Dari kegiatan produksi merekalah dihasilkan limbah yang selanjutnya menjadikan sumber masalah karena pengelolaannya yang belum optimal. Apabila pada zaman dahulu batik di warnai dengan pewarna alam, seperti dari dedaunan yang ada di alam ini, sehingga limbahnya tidak perlu dikelola secara khusus, karena tidak berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan, namun pada era modern ini pewarnaan menggunakan bahan kimia menghasilkan limbah yang berbahaya dan harus dikelola agar tidak memberikan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.

Walaupun UKM batik Laweyan melakukan kegiatan produksi yang sama, ternyata hambatan yang muncul berbeda-beda, karena masing-masing UKM batik

memang berbeda-beda cara berpartisipasinya dalam mengelola limbah. Bapak Arif Wicaksono pemilik batik 'Gress Tenan', berpendapat:

“Hambatan dalam pengelolaan limbah yang saya rasakan hanya ketersediaan suku cadang IPAL susah di dapatkan. Misalnya filter di IPAL itu rusak, pesan hari ini, datangnya bisa beberapa hari lagi, tidak bisa langsung dapat. Jadi tidak bisa sembarangan suku cadangnya. Pokoknya kalau yang memasang filternya benar, itu 3 bulan 1x harus ganti.” (wawancara 23 November 2012)

Bapak Arif Wicaksono sebagai salah satu UKM batik yang sudah menggunakan IPAL komunal di kampung batik memang hanya menemui sedikit hambatan dalam mengelola limbah, karena memang selama ini IPAL yang ada masih terus berfungsi, dirawat bersama-sama, dan memeberikan hasil yang nyata dengan air limbah yang mempunyai kemampuan reduksi 75%, memang belum sempurna tingkat reduksinya, tapi sudah mengurangi pencemaran pada media lingkungan.

Bagi UKM batik yang mendapatkan bantuan pengelolaan limbah pada dasarnya memang hanya memiliki sedikit hambatan dalam mengelola limbah industrinya. Hampir sama dengan bapak Arif Wicaksono, Bapak Bambang Slameto juga merupakan salah satu UKM yang sudah mengelola limbah dengan metode yang sama dengan IPAL, hanya saja ini merupakan IPAL pribadi bantuan dari LSM, bapak Bambang Slameto yang merupakan pemilik batik 'Merak Manis' ini bahkan tidak menemukan hambatan dalam melakuka pengelolaan limbah, beliau berkata, “Kalau dari saya sendiri tidak ada hambatan, karena semuanya ya lancar-lancar saja.”. (wawancara 26 November 2012)

Namun memang masih sedikit jumlah UKM batik yang mendapatkan bantuan pembangunan pengelolaan limbah dari pihak luar, seperti yang diterima oleh bapak Arif Wicaksono dan bapak Bambang Slameto, hanya ada 1 IPAL komunal yang dipakai oleh 9 UKM batik, dan 1 IPAL pribadi milik bapak Bambang Slameto, dan UKM batik selain itu tidak memproses limbah yang akan dibuang ke media lingkungan. Hambatan pengelolaan limbah yang dihadapi oleh UKM batik yang belum mendapatkan bantuan atau yang belum mempunyai IPAL tentu saja lebih banyak dari pada UKM yang sudah mendapatkan bantuan atau yang mempunyai IPAL.

Bapak Rudi pemilik 'Batik Mutiara' merupakan salah satu UKM yang tidak mempunyai IPAL di Laweyan, beliau berpendapat :

“Kalau hambatannya yang pertama, saya tidak tahu bagaimana caranya mengelola limbah industri batik, lalu tidak ada penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan limbah itu sendiri, kalau masalah biaya itu kan masih belum tau juga, soalnya cara mengelolanya saja saya tidak tahu, apalagi biayanya.” (wawancara 27 November 2012).

Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan menjadi hambatan yang hampir semua UKM yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pengetahuan dalam hal mengelola limbah memang belum dimiliki sebagian besar pengusaha batik di Laweyan, sehingga UKM batik membutuhkan bantuan ahli dibidangnya agar limbah yang berbahaya dapat dikelola menjadi limbah yang aman bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu minimnya peluang yang diberikan pemerintah kepada UKM batik untuk berpartisipasi dalam mengelola limbah,

taktis hanya pada wilayah kampung batik saja yang memiliki kesempatan besar dalam berpartisipasi mengelola limbah industri batik.

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Angga pemilik 'Batik Egi' yang juga merupakan UKM yang belum menerima bantuan pengelolaan limbah dari manapun, beliau berpendapat:

“kalau biasanya itu hambatan pengelolaan limbah adalah masyarakat, soalnya masyarakat biasanya menolak limbah dari industri batik, soalnya pada takut, tapi kalau masyarakat disini kan sudah menerima, kan memang sudah lama industri batik disini, jadi sudah pada paham lah, selain itu semua di kampung ini kan industri batik semua rata-rata, jadi semua sudah sama-sama mengerti. Kalau dikampung batik, produksi disana, limbahnya tidak dikelola, langsung di demo, ya makanya di sana banyak *showroom* nya, produksinya ya disini.”
(wawancara 24 November 2012)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa bapak Angga sudah menganggap pengelolaan limbah yang dilakukannya selama ini sudah cukup, dengan tolak ukur protes dari masyarakat. Selama masyarakat sekitar tidak melakukan protes, maka kemungkinan bapak Angga dan pengusaha batik lain di desa tersebut tidak akan merubah proses pengelolaan limbah. Keterbatasan pengetahuan dan minimnya kesadaran dari UKM batik juga terlihat dari pendapat bapak Angga tersebut, bahwa mereka belum mempunyai kesadaran pentingnya limbah itu dikelola bukan hanya karna tuntutan masyarakat, tapi karena harus menyadari bahwa itu merupakan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pelaku penghasil limbah.

Sedangkan dari sudut pandang Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan (FPKBL) sebagai satu-satunya organisasi yang dijadikan wadah bagi para pengusaha batik khususnya di kampung batik Laweyan. Bapak Arif Budiman sebagai kepala bidang IT di FPKBL berpendapat:

“Hambatan dalam mengelola limbah itu keterbatasan kapasitas IPAL, nanti kalau tumbuh industri-industri baru kan belum tercover sama IPAL, tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya, atau membuat IPAL baru, yang kedua ada beberapa yang belum tercover karena letak geografis, atau faktor gravitasi. Selanjutnya hambatan dalam *maintenance*, kan perlu dilakukan pengecekan secara regular, beberapa bulan sekali, untuk melihat betulkah kemampuan reduksinya 75%, betulkah terus stabil segitu, atau menurun, itu kan harus di *chek* oleh pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini pihak yang tau ilmunya dan punya peralatan. Kemarin sudah ada usaha dengan menggandeng UNS, ini sedang dikomunikasikan untuk bagaimana memantau, sejauh mana tingkat keefektifitasannya secara teratur, mungkin 3 bulan sekali, atau beberapa bulan sekali.” (wawancara 7 November 2012)

Pendapat bapak Arif Budiman tersebut memang hanya menyoroti hambatan pengelolaan limbah yang berhubungan dengan IPAL di kampung batik. Memang IPAL merupakan alat pengelola limbah satu-satunya yang ada di Laweyan, sehingga apabila terjadi hambatan terkait dengan IPAL, maka terhambat pula pengelolaan limbah UKM batik di kampung batik, karena UKM batik di tempat tersebut memang hanya bertumpu pada IPAL dalam mengelola limbahnya. Sebenarnya hambatan tersebut merupakan hambatan yang bersifat kelompok, hambatan yang hanya dirasakan bagi UKM pengguna IPAL. Namun memang itulah porsi jawaban dari FPKBL yang sejauh ini hanya memayungi UKM di kampung batik Laweyan saja, sedangkan UKM batik di daerah Laweyan

yang lain masih merupakan pekerjaan rumah bagi FPKBL agar dapat dirangkul menjadi anggotanya.

Hambatan lain yang muncul dalam pengelolaan limbah di Laweyan dari sudut pandang pemerintah melalui BLH Surakarta sendiri berbeda dengan sudut pandang UKM dan FPKBL, Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLH Surakarta, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si, berpendapat:

“Kendala dalam pengelolaan limbah industri batik Laweyan itu ada 2, yang pertama penegakan hukum tidak ada, yang ke dua tenaga untuk melakukan pengawasan kurang. Yang mengelola pengendalian limbah disini cuma 2 orang, untuk 1 kota Surakarta. Lalu kalau penegakan hukum itu ya sanksi. Sekarang saya bertanya kepada anda, kalau penduduk Surakarta ini ditanya, boleh tidak membuang sampah di sungai atau selokan?, semua pasti menjawab tidak boleh atau tidak bagus, tetapi kenyataannya kan semua masih buang sampah di sungai. Itu karena tidak ada kesadaran dan kurangnya pegakan hukum, orang yang buang sampah di sungai tidak pernah dihukum. Karena begini, orang itu hukum alamnya selalu mencari keuntungan, kalau saya bisa buang disini, ngapain saya buang ke TPS?, kan tidak di apa-apain, yang lainnya bisa seperti itu, kenapa saya tidak?.” (wawancara 8 November 2012)

BLH Surakarta mengeluhkan jumlah personil yang kurang dalam menangani masalah pengendalian limbah. Kekurangan jumlah personil ini merupakan masalah yang logis, karena memang untuk mengurus berbagai permasalahan limbah di kota Solo ini tidak akan bisa dikelola oleh hanya 2 orang saja, untuk UKM batik saja jumlahnya sekitar 124 industri, sedangkan masih terdapat banyak kegiatan-kegiatan produksi usaha lain yang juga masih memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan limbahnya. Namun untuk

mengatasi hambatan ini merupakan suatu yang dilematik, karena di dalam pemerintahan berbeda dengan kantor swasta, apabila pada kantor swasta kekurangan personil dapat dengan cepat mencari kekurangan personil tersebut, di kantor pemerintahan salah satunya BLH Surakarta ini tidak dapat dengan mudah untuk menambah jumlah personil walaupun dalam keadaan kekurangan personil, karena harus melalui beberapa proses panjang sebelumnya, serta terdapat aturan-aturan baku lainnya yang berkaitan dengan kebijakan.

Hambatan yang lain terkait penegakan hukum yang dinilai kurang tegas ini juga susah dibenahi dalam waktu singkat. Karena pengawasan terhadap pelanggaran UKM itu memerlukan biaya dan waktu yang banyak, selain itu pemerintah juga sangat menginginkan tumbuhnya UKM agar dapat membantu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, sampai dengan adanya program khusus pinjaman kepada UKM agar dapat terus berkembang menjadi industri yang besar. Apabila UKM terlalu di berikan tekanan yang ketat dari ranah hukum, tentu saja akan dapat menghambat pertumbuhan dari UKM, termasuk UKM batik Laweyan. Terlebih lagi kini UKM batik di Laweyan sudah merambah pasar internasional yang juga memberikan pendapatan bagi negara, sehingga penegakan hukum ini dilemma untuk ditegaskan.

Hambatan yang muncul baik dari pihak pemerintah maupun pihak UKM batik ini merupakan hal yang wajar dalam sebuah upaya penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa *stakeholders* untuk berpartisipasi di dalamnya.

Menurut teori Agus Dwiyanto (2005) hambatan partipasi yang dapat muncul dari pemerintah dan masyarakat itu adalah:

Dari pihak pemerintah, kendala yang muncul dapat berupa:

1. Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik.
2. Lemahnya dukungan SDM yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
3. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat.
4. Lemahnya dukungan anggaran. Karena kegiatan peningkatan partisipasi publik sering kali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran secara berkelanjutan. Akibatnya, kegiatan partisipasi hanya berjalan beberapa saat dan selanjutnya penyelenggaraan pelayanan publik akan kembali kepada praktik-praktik lama seperti pada saat program peningkatan partisipasi belum dilakukan.

Dari pihak masyarakat, kendala yang muncul dapat berupa:

1. Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat selama ini meyulitkan manakala mereka diminta untuk melakukan diskusi terbuka dengan para pejabat publik yang mereka anggap menduduki posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat, apalagi jika harus melakukan kritik secara terbuka kepada pejabat publik pada waktu dialog publik.
2. Apatisme. Karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah maka mereka menjadi bersikap apatis. Kondisi ini akan menyulitkan ketika pemerintah melakukan inisiatif untuk mengajak mereka berpartisipasi.
3. Tidak adanya *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. pengalaman masa lalu di mana masyarakat hanya dijadikan objek pemerintah, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dari teori hambatan partisipasi yang disampaikan oleh Agus Dwiyanto tersebut memang tidak sepenuhnya tepat seperti apa yang menjadi hambatan partisipasi dalam pengelolaan limbah industri batik, namun ada beberapa poin dari teori Agus Dwiyanto tersebut yang sesuai dengan apa yang menjadi hambatan bagi UKM dan pemerintah dalam mengelola limbah industrinya.

Pada sisi pemerintah lemahnya dukungan SDM memang dikeluhkan oleh Bapak Sultan Nadjamuddin yang hanya terdapat 2 orang personil, yang jelas

sudah tidak mendukung dari segi kuantitasnya. Sehingga personil pemerintahan yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola limbah tidak dapat terlaksana.

Pada poin berikutnya mengenai masalah lemahnya dukungan anggaran untuk memberikan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi. Faktor ini juga menghambat BLH Surakarta dalam melakukan kegiatannya untuk mengelola limbah UKM batik yang ada di Laweyan. Pembuatan IPAL komunal sampai sekarang merupakan cara yang diandalkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran limbah. Namun karena terbentur kendala dana, maka BLH baru dapat membuatkan 1 IPAL komunal untuk kampung batik Laweyan, sementara di daerah yang lain masih menunggu bantuan dari pemerintah berikutnya. Selain itu banyak lagi kegiatan-kegiatan BLH yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari proses pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, semua membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah.

Berikutnya hambatan yang muncul dari masyarakat menurut Agus Dwiyanto, yang sesuai dengan keadaan di UKM batik laweyan adalah poin budaya paternalism, permasalahan ini muncul sebagai hambatan bagi UKM batik Laweyan karena UKM yang menganggap posisi BLH itu lebih tinggi dari mereka, sehingga semua kegiatan mereka selalu menunggu arahan dari pemerintah, termasuk tentang pengelolaan limbah, yang hanya menunggu pemerintah menyentuh mereka, dengan bantuan-bantuan seperti yang sudah diterima UKM Batik yang ada di kampung batik. Budaya paternalism ini menimbulkan

ketergantungan yang lebih para UKM kepada BLH, dan menghambat munculnya rasa partisipasi dari dalam diri pengusaha batik tersrbut.

Lalu poin selanjutnya yang menjadikan hambatan dari UKM batik Laweyan adalah sikap apatis mereka. UKM batik Laweyan memang belum pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang ditujukan kepada mereka, UKM batik menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga rasa apatis ini muncul yang berdampak pada partisipasi mereka untuk mengikuti arahan-arahan atau kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Jadi bisa dikatakan bahwa hambatan yang muncul dalam pengelolaan limbah UKM batik Laweyan ini bergam, dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, maka muncul hambatan yang berbeda-beda pula. Masing-masing hambatan memang harus memiliki jalan keluar, agar pengelolaan limbah UKM batik Laweyan dapat dilakukan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar partisipasi UKM batik Laweyan dalam mengelola limbah bisa dikatakan masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari 2 jenis partisipasi yang terdapat pada tahapan pengelolaan limbah UKM batik Laweyan, yaitu berdasarkan cara keterlibatan, serta melihat intensitas dan frekuensi partisipasi, agar partisipasi UKM batik Laweyan dapat terlihat secara lebih jelas, akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara keterlibatan

Cara keterlibatan UKM Batik Laweyan dalam mengelola limbahnya adalah cara keterlibatan secara langsung, artinya UKM batik ikut melakukan kegiatan pengelolaan limbah, tanpa mewakilkannya pada wakil-wakil rakyat. Cara keterlibatan secara langsung ini dijabarkan menjadi 4 kegiatan yang merupakan rangkaian dari proses pengelolaan limbah, yaitu memiliki surat ijin usaha atau rekomendasi lingkungan, menghadiri rapat dengan BLH, menghadiri rapat antar UKM batik, lalu mengelola limbah dari proses produksinya.

Proses pertama dalam rangkaian pengelolaan limbah merupakan tahap pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh limbah. Kegiatan ini dilakukan sebelum UKM mendirikan industrinya. Partisipasi UKM batik Laweyan dalam kepemilikan surat ijin usaha ini atau rekomendasi lingkungan

ini ternyata masih beragam. Ada pengusaha yang berpartisipasi dan membuat surat ijin usaha/rekomendasi lingkungan, ada pula yang tidak memilikinya. Namun dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Laweyan, UKM yang tidak memiliki ijin usaha/rekomendasi lingkungan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan UKM yang memiliki ijin usaha. Keterbatasan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pada umumnya menjadi faktor penyebabnya.

Selanjutnya adalah cara keterlibatan UKM batik untuk berpartisipasi dalam menghadiri rapat dengan BLH Surakarta, membahas tentang pengelolaan limbah industri batik di Laweyan. Dalam hal ini partisipasi UKM batik Laweyan dapat dikatakan masih rendah berpartisipasi menghadiri setiap rapat dengan BLH. UKM batik yang pernah menghadiri rapat BLH itupun hanya UKM batik yang berada di kawasan kampung batik, sedangkan UKM batik di luar kampung batik Laweyan belum pernah menghadiri rapat dengan BLH. Ini berarti tidak meratanya kesempatan UKM batik Laweyan untuk berpartisipasi menghadiri rapat dengan BLH juga menjadi penyebab minimnya partisipasi UKM batik.

Cara keterlibatan yang ke tiga adalah partisipasi UKM dalam menghadiri rapat atau diskusi sesama UKM batik mengenai permasalahan pengelolaan limbah. Partisipasi UKM batik dalam hal ini masih belum maksimal, karena memang jumlah UKM yang menghadiri dan membuat rapat antar UKM hanya sebagian kecil.

Proses terakhir dalam cara keterlibatan UKM batik adalah bagaimana UKM batik mengelola limbah batiknya sendiri. Pada tahapan yang vital ini, ternyata partisipasi UKM batikpun masih bervariasi. UKM batik yang mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang pada media lingkungan atau sungai ternyata hanya UKM batik yang berada di kampung batik, itu pun belum semua, hanya ada 10 dari 26 UKM batik di kampung batik yang mengelola limbahnya sebelum dibuang, hal ini dikarenakan adanya 1 IPAL komunal dan 1 IPAL pribadi. Sementara itu UKM diluar kampung batik tidak melakukan proses pengelolaan limbah sebelum dibuang, dengan kata lain mereka langsung membuang limbahnya ke media lingkungan.

2. Intensitas dan Frekuensi Kegiatan

Intensitas dan frekuensi kegiatan yang dapat diukur dalam hal ini adalah pada kegiatan rapat antara UKM dengan BLH, dan rapat antar UKM batik yang membahas mengenai pengelolaan limbah. Dari kedua kegiatan tersebut memunculkan tipe partisipasi UKM yang sama, yaitu partisipasi ekstensif, yang berarti bahwa kedua kegiatan rapat tersebut dilakukan secara tidak teratur, tidak terdapat jadwal yang tetap, tidak terstruktur, dan dalam interval waktu yang panjang.

Terdapat perbedaan intensitas antara UKM batik yang berada di kampung batik dengan UKM yang berada di luar kampung batik. UKM yang berada di kampung batik memang pernah melakukan kedua rapat tersebut hanya saja masih masuk kategori ekstensif, sedangkan UKM batik yang

berada di luar kampung batik cenderung belum pernah menghadiri dan mendapatkan undangan kedua rapat tersebut.

3. Hambatan

Hambatan yang terdapat dalam upaya pengelolaan limbah ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu:

a. UKM Batik Laweyan

Dari sisi UKM batik hambatan yang muncul berupa minimnya pengetahuan akan bagaimana pengelolaan limbah dapat dilakukan, mayoritas dari UKM batik Laweyan tidak melakukan pengelolaan limbah karena pengetahuan mereka yang masih minim terkait dengan proses pengelolaan limbah. Lalu sikap ketergantungan yang besar terhadap pihak luar, terutama pemerintah, membuat UKM batik melakukan pengelolaan limbah apabila ada bantuan dari pihak luar.

b. FPKBL

Dari sudut pandang FPKBL hal yang dapat menghambat pengelolaan limbah adalah kapasitas IPAL komunal yang masih kurang sebagai satu-satunya alat pengelolaan limbah di kampung batik Laweyan, kurangnya tenaga ahli untuk melakukan perawatan IPAL secara rutin.

c. BLH Surakarta

Dari sisi BLH Surakarta hambatan yang muncul berupa kurangnya personil yang bertugas untuk menangani masalah pengelolaan limbah atau pencemaran, hanya terdapat 2 orang di dalam BLH yang menangani

masalah tersebut. Lalu hukum yang kurang tegas menindak semua pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh UKM batik Laweyan.

B. Saran

Dalam penelitian yang sudah selesai dilakukan tentu saja dapat diketahui beberapa kekurangan dan hambatan yang muncul dari masing-masing *stakeholders* dalam mengelola limbah UKM batik Laweyan. Oleh karena itu terdapat beberapa saran kepada *stakeholders* terkait dengan masalah ini:

1. BLH seharusnya melakukan penyuluhan yang lebih intensif kepada UKM batik Laweyan berkaitan dengan pengelolaan limbah, baik dampak positif negatifnya, serta langkah-langkah pengelolaan limbahnya.
2. Dibentuknya organisasi kelompok UKM batik pada setiap daerah sentra industri batik di Laweyan, seperti FPKBL yang terdapat di Kampung Batik Laweyan. Dibentuknya organisasi seperti itu penting sebagai sarana berkomunikasi dan berkoordinasi baik kepada pemerintah, maupun sesama UKM, sehingga dapat memajukan industri batik itu sendiri serta dapat mempermudah upaya pengelolaan limbah.
3. Dibuatnya IPAL komunal pada daerah sentra industri batik di Laweyan selain pada kampung batik oleh BLH, dengan menggandeng kerjasama berbagai pihak lain, seperti LSM lingkungan hidup. Namun IPAL yang akan dibangun sebaiknya dapat lebih baik dari IPAL yang sudah pernah ada, dan dapat

menampung air limbah dari semua UKM batik yang ada pada satu sentra industri batik. Adanya IPAL memang dapat meningkatkan partisipasi UKM dalam mengelola limbah dan pencemaran dapat dikurangi.

